

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI PANCASILA
DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN PASAR
TRADISIONAL DI AMBULU**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

M. Imron Fauzi
NIM: E20152117

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2020**

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI PANCASILA
DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN PASAR
TRADISIONAL DI AMBULU**

SKRIPSI

Skripsi

Telah dipuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Tanggal 30 Januari 2020

Tim Penguji

Komis

Sekretaris

Oleh :

M. Imron Fauzi
NIM: E20152117

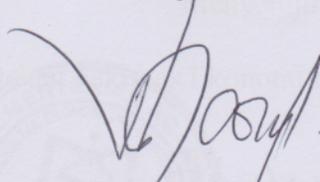
TOTON FANSHURNA
NIP. 19811223 201101 1

ULU HASANAH, S.E., M.P.
NIP. 19750303 200901 1 009

1. Dr. Nurul Wafiqah IR, M.Si

2. Daru Anondo, SE, M.Si

Disetujui Pembimbing



Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI PANCASILA
DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN PASAR
TRADISIONAL DI AMBULU**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua

TOTON FANSHURNA, M.E.I
NIP. 19811224 201101 1 002

Sekretaris

HIKMATUL HASANAH, S.E.I., M.E
NUP. 201708173

Anggota:

1. Dr. Nurul Wid'yawati IR, M.Si
2. Daru Anondo, SE. M.Si

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. K. Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

10/2 - 20

MOTTO

“Gotong-rojong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perdjongan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Rojong!”¹ –Soekarno (pidato pada sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*)



¹ Sukarno, *Tjamkan Pantja Sila! Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1964),32.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, berawal dari sebuah proses pembelajaran yang sangat panjang dan penuh dengan perjuangan, kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan dengan diakhiri dengan rasa bersyukur akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa syukur saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Terhusus kepada Ibunda tercinta Almarhumah Ibu Hj. Siti Ma'rifah yang telah membesarkan, mendidik serta selalu mendukungku dalam segala hal. Tentunya beliau adalah seseorang yang benar-benar menantikan kelulusan studiku di S1. Sebab, saat Ibu belum meninggal dunia, berkali berkali-kali Ibu bilang kepadaku ingin menghadiri acara wisudaku kelak, namun Ibu telah dipanggil untuk pulang ke Rohmatullah saat ketika aku baru satu hari mulai mengerjakan skripsi. Semoga skripsi yang telah selesai kukerjakan ini bisa membuat ibu bahagia di alam kubur sana, dan semoga menjadikan lantaranku untuk tergolong anak yang *birrul walidain*.
2. Kepada Ayahanda Bapak H. Syukron Hamim yang telah mendidik, membesarkan dan membanting tulang untuk membiayaiku hingga aku lulus dari bangku kuliah. Pengorbanan Bapak tidak akan bisa aku balas sampai kapanpun, semoga kelak aku dapat membahagiakan dan bisa membuat Bapak bangga.
3. Kepada saudara kandungku Zaenal Arifin, Ali Muhtar, Umi Hanik, Imam Syafi'I dan mbak didin, yang selalu memberikan dorongan semangat, kasih sayang sumbangsih lainnya yang terus memberikan motivasi untuk terus menyelesaikan kuliah.
4. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah menjadi guru sekaligus orang tua kedua bagiku selama perkuliahan. Terimakasih karena telah mendidik, memberikan pengetahuan, pengalaman dan semangat hingga aku lulus kuliah.

5. Sahabat-sahabatku teman seperjuangan di organisasi UKM Unit Beladiri Mahasiswa, Kawan-kawan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Rekan-rekanita PAC IPNU-IPPNU kecamatan Jenggawah, dan juga kepada teman-teman di Karang Taruna Desa Jatimulyo, terimakasih untuk semuanya, bersama kalian aku telah berproses hingga menjadi seseorang seperti saat ini. Rasa kekeluargaan dan semangat perjuangan takkan pernah luntur sampai kapanpun.
6. Kepada semua teman-temanku yang telah membantuku dalam menyelesaikan tugas ahir.
7. Tak lupa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut berjuang dan telah aku repotkan, khususnya kepada yang telah meminjami laptopnya dari mulai aku mengerjakan proposal hingga aku sidang skripsi.
8. Keluarga besar GOES kelas Ekonomi Syariah 3 angkatan 2015 yang selalu saling, mendukung dan membatu agar bisa sama-sama menyelesaikan skripsi kita masing-masing.
9. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
10. Almamaterku IAIN Jember yang selalu saya banggakan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tyercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
3. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Jember, 30 Januari 2020

M. Imron Fauzi
NIM: E20152117

ABSTRAK

M. Imron Fauzi, Daru Anondo, SE. M.Si 2019: *Implentasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan Perekonomian Pasar Tradisional Di Pasar Ambulu.*

Gagasan Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ekonomi Pancasila harus terkait langsung dengan ekonomi rakyat kecil, dan bertumpu pada moralitas yang mengedepankan gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan sebagaimana yang telah terkandung dalam pasal 33 UUD 1945.

Fokus penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu? 2) Bagaimana pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui apakah di Pasar Ambulu sudah menerapkan nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam aktifitas ekonominya. 2) Untuk mengetahui seperti apa bentuk pemberdayaan yang sudah di terapkan di Pasar Ambulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dalam penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive* serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah; 1) Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu sudah terimplementasikan. Dimulai dari sila pertama di Pasar Ambulu nilai etika dan moral sangatlah dikedepankan. Dibuktikan dengan tidak adanya gejala kriminal apapun yang menyebabkan terjadinya keresahan. Sila yang kedua di Pasar Ambulu nilai kemanusiaan dan nilai sosialnya tinggi. Setiap ada kegiatan sosial, para pedagang di Pasar Ambulu sangatlah antusias dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Selain itu, antar sesama pedagang mereka juga mengedepankan nilai-nilai gotong royong serta tolong menolong antar sesama. Sila Pancasila yang ketiga di Pasar Ambulu sudah menerapkan nilai-nilai persatuan terbukti dengan kekompakan serta adanya organisasi yang mempersatukan para pedagang organisasi tersebut adalah IPPMA. Sila keempat didalam Pasar Ambulu adalah pemberian fasilitas dalam bentuk kios yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang itu sendiri dan dalam penentuan harga menerapkan sistem tawar menawar. Dan yang terakhir adalah sila kelima yang merupakan ujung harapan dari semua Sila. Di Pasar Ambulu tingkat kesejahteraan dari para pedagang tidak ada ketimpangan. Artinya, sila keadilan sosial sudah terimplementasikan di Pasar Ambulu. 2) Bentuk pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu dilakukan oleh para pedagang itu sendiri seperti memperbaiki kios dan usaha melariskan dagangan. Sedangkan Dinas Pasar memiliki peran menertibkan dan mengawasi pasar, agar aktifitas jual beli di pasar ambulu bisa berjalan lancar. Selain itu, Dinas Pasar masih berusaha menyelesaikan sertifikasi lahan. Setelah selesai kemudian Dinas mengajukan permohonan renovasi bangunan kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci: Ekonomi Pancasila, Pemberdayaan Pasar.

ABSTRACT

M. Imron Fauzi, Daru Anondo, SE. M.Si 2019: *Implementation of Pancasila Economic Values in Empowering Traditional Market Economies in Ambulu Market.*

The Pancasila Economic Idea emerged as a form of the acceptance of the Pancasila ideology as the basis of the state and the philosophy of life in the nation and state. Pancasila economy must be directly related to the economy of the small people, and relies on morality that prioritizes mutual cooperation, togetherness, and kinship as contained in article 33 of the 1945 Constitution.

The focus of research in this thesis is: 1) How is the Implementation of Pancasila Economic Values in the Ambulu Market? 2) How is economic empowerment in the Ambulu Market?

This research aims to: 1) To find out whether the Ambulu Market has applied Pancasila Economic values in its economic activities. 2) To find out what form of empowerment that has been applied in the Ambulu Market.

This research uses a qualitative approach and descriptive research type. In determining the research subject using purposive and using data collection techniques through observation, interviews and documentation.

The results of this study are; 1) Pancasila Economic Values in the Ambulu Market have already been implemented. Starting from the first precept in the Ambulu Market, ethical and moral values are highly promoted. Evidenced by the absence of any criminal turmoil that causes anxiety. The second precept in Ambulu Market is that humanity and social value are high. Every time there is a social activity, the traders at Ambulu Market are very enthusiastic in making this activity a success. In addition, among their fellow traders they also prioritize mutual cooperation values and help each other. The third Sila Pancasila in the Ambulu Market has implemented the values of unity as evidenced by the cohesiveness and the organization that unites the traders of the organization is IPPMA. The fourth precept in Ambulu Market is the provision of facilities in the form of kiosks that are adjusted to the needs of the traders themselves and in determining the price applying the bargaining system. And the last is the fifth precept which is the end of all Sila's hopes. In Pasar Ambulu there is no imbalance in the level of welfare of traders. That is, the precepts of social justice have been implemented in the Ambulu Market. 2) The form of economic empowerment in the Ambulu Market is carried out by the traders themselves, such as repairing kiosks and trading businesses. Whereas the Market Office has the role of controlling and controlling the market, so that trading activities in the ambulu market can run smoothly. In addition, the Market Office is still trying to complete land certification. After completion, the Dinas submits a request for renovation of the building to the local government.

Keywords: Pancasila Economy, Market Empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	31
a. Sejarah Ekonomi Pancasila	31
b. Pengertian Ekonomi Pancasila.....	37
c. Filosofis Ekonomi Pancasila	40

d.	Dasar Yuridis Ekonomi Pancasila.....	45
e.	Tantangan Sistem Ekonomi Pancasila.....	50
f.	Landasan Sosial Ekonomi.....	55
g.	Peberdayaan Ekonomi.....	56
h.	Pengertian Pasar.....	51
i.	Pengertian Pasar Tradisional.....	59
1.	Keunggulan Pasar Tradisional.....	60
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B.	Lokasi Penelitian.....	64
C.	Subyek Penelitian.....	65
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	68
E.	Teknik Analisis Data.....	71
F.	Teknik Keabsahan Data.....	73
G.	Tahapan-Tahapan Penelitian.....	75
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A.	Gambar Ojek Penelitian.....	76
a.	Sejarah Singkan Pasar Tradisional Ambulu.....	76
b.	Letak Geografis.....	77
c.	Visi dan Misi Pasar Ambulu.....	78
d.	Struktur Pasar Ambulu.....	79
e.	Data Pedagang Pasar Ambulu.....	80
f.	Latar Belakang Pedagang Pasar Ambulu.....	83

B. Penyajian Data dan Analisis	83
a. Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu	84
b. Bentuk - Bentuk Pemberdayaan Perekonomian di Pasar Ambulu	88
C. Pembahasan Temuan	90
a. Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu.....	90
b. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Perekonomian di Pasar Ambulu	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Keterangan Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Jurnal Penelitian	
7. Data Pedagang Pasar Ambulu	
8. Dokumentasi (Foto-Foto)	
9. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	27
1.2 Tabel Jenis Dagangan dan Jumlah	80
1.3 Tabel Jenis Dagangan dan Jumlah di Pasar Tumpah.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang digali sedalam-dalamnya oleh bung Karno dari sejarah bangsa Indonesia sendiri, untuk dijadikan sebagai ideologi serta pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Pancasila sebagai *Weltanschauung* berarti nilai-nilai pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan praksis kehidupan di dalam masyarakat bangsa Indonesia yang diatur oleh nilai-nilai Pancasila.¹

Negara Indonesia dengan cita-cita kebangsaan yang besar, sebagaimana yang telah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni menciptakan “masyarakat adil dan makmur”, tentu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Pancasila seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila Sila ke lima yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Cita-cita “masyarakat adil dan makmur” akan tercapai jika bangsa Indonesia mampu menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi. Sebab, Pancasila harus menjadi dasar bagi

¹ Yudistira, “Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa” *UNNES*, 2 (2016), 424.

sistem perekonomian di Indonesia. Implementasi Pancasila dalam ekonomi sering kita sebut dengan istilah “Ekonomi Pancasila”.

Gagasan Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1980 istilah Ekonomi Pancasila mulai populer, yakni dengan munculnya pendapat seorang Guru Besar dari Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Mubyarto, yang mengemukakan pendapatnya tentang Ekonomi Pancasila, dan mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila. Artinya mekanisme bekerjanya (sistem) Ekonomi Pancasila didasarkan pada data-data riil ekonomi yang moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio demokratik. Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi normatif (*das sollen*) tetapi ekonomi positif (*das sein*) sekaligus normatif, karena menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia Indonesia yang merupakan *homo socius*, *homo ethicus*, sekaligus *homo economicus* dalam sistem ekonomi yang berdasar atas kekeluargaan”²

Artinya, Ekonomi Pancasila harus terkait langsung dengan ekonomi rakyat kecil, dan bertumpu pada moralitas yang mengedepankan gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan sebagaimana yang telah terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. Namun demikian, peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian rakyat belum ada kebijakan yang cukup berarti. Dewasa ini, sangat terasa bagi kita orientasi pembangunan pemerintah masih serba elitis, dimana pembangunan proyek mega infrastruktur menjadi salah satu kebijakan andalan pemerintah. Bahkan baru-baru ini, pemerintah membuat kebijakan pemindahan ibu kota negara dari

² Hastangka, “Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto”, *Jurnal Filsafat*, 1 (April, 2012), 8.

Jakarta ke Kalimantan dengan maksud pemerataan pembangunan, sehingga menghabiskan dana sebesar 466 Triliun. Tidak kemudian dana itu digunakan untuk memberikan perhatian lebih dalam meningkatkan pemberdayaan perekonomian rakyat kecil. Selain itu, sikap dengan mudah menentukan kenaikan harga, semisal naiknya BPJS dan setoran listrik, menunjukkan hal itu dengan jelas bahwa prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” belum sepenuhnya diterapkan. Tentulah kenaikan harga itu harus menunggu kenaikan pendapatan terlebih dahulu, bukan sebaliknya.³

Ekonomi Pancasila, memiliki cita-cita mewujudkan kesejahteraan sosial melalui proses bersama atau gotong royong, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*Humanisme*) dengan melakukan distribusi yang adil dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu diwujudkan melalui Ekonomi Pancasila yang dilandasi oleh nilai-nilai etik religius yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Salah satu contoh penerapan nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam perekonomian rakyat kecil adalah pada kegiatan pasar tradisional. Sebab, pasar tradisional merupakan bagian yang melekat dari kehidupan sosial masyarakat, yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan norma serta adat di daerah tersebut. Hingga kemudian, pasar tradisional mampu menjadi sarana kegiatan ekonomi yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan

³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam, 2006), 168.

rakyat. Pasar tradisional juga memiliki aktifitas jual beli yang sederhana, disana terjadi tawar menawar dengan alat pembayaran berupa uang tunai.⁴

Dalam pasar tradisional tidak ada peraturan yang ketat, hanya peraturan antar pedagang saja, sehingga hal itu akan memudahkan kepada semua pedagang untuk keluar masuk pada pasar tradisional. Bahkan, pasar tradisional memperbolehkan pedagang yang berbeda, tetapi menjual barang yang sejenis. Artinya, pasar tradisional sangat mengedepankan prinsip kerakyatan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam setiap aktifitasnya, sebagaimana yang terakandung dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945.

Oleh sebab itu, pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya dan juga mempertahankan eksistensinya, sebab ia adalah representasi dari ekonomi rakyat, serta tempat bergantungnya para pedagang kelas kecil menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, nelayan atau produsen lainnya yang berlatar belakang rakyat kecil.

Salah satu pasar tradisional Indonesia terdapat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yaitu pasar Ambulu, yang terletak di samping alun-alun Kecamatan Ambulu. Pasar Ambulu, merupakan pasar tradisional yang mampu bertahan serta masih eksis meski keberadaannya mulai terancam sejak hadirnya pasar modern di sekitarnya, seperti Dira dan La Risso.

Pasar Ambulu, beroperasi setiap hari mulai pukul 03.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB untuk pedagang yang berjualan di depan pasar yang hanya dengan lesehan dibawah atau tanpa menggunakan kios. Adapun barang

⁴ Wahyu Dwi Sutami, "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional", *BioKultur*, 2 (Desember 2012), 128.

yang dijual merupakan kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran, beras, ikan dan kebutuhan dapur lainnya.

Kemudian, setelah aktifitas jual beli yang bertempat di halaman pasar selesai, aktifitas jual beli berlanjut di dalam Pasar Ambulu sampai sore hari, dengan menggunakan kios-kios yang telah disediakan oleh pasar. Barang yang dijualnya pun sangat fariatif dan lebih lengkap, bahkan segala macam kebutuhan telah tersedia. Setelah itu, menjelang petang hingga sekitar jam 21.30 WIB, aktifitas jual beli kembali dilanjutkan didepan Pasar Ambulu. Barang yang di jual berupa berbagai macam jenis pakaian.⁵

Di Pasar Ambulu berbeda dengan pasar tradisional yang lain, sebab di Pasar Ambulu aktifitasnya perekonomiannya hampir 24 jam. Artinya, Pasar Ambulu benar-benar merepresentasikan kebutuhan perekonomian rakyat. Selain itu, di Jember bagian selatan, kebanyakan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan jarang yang datang ke Jember kota, karena segala kebutuhan sudah di penuhi di pasar Ambulu.

Dari kondisi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini, yakni kurangnya perhatian terhadap kebijakan dalam pemberdayaan terhadap ekonomi rakyat, sedangkan dalam Ekonomi Pancasila seharusnya perekonomian harus terkait langsung dengan ekonomi rakyat kecil. Maka disini peneliti tertarik untuk meneliti seperti apa nilai-nilai Ekonomi Pancasila beserta pemberdayaan yang diterapkan pada perekonomian pasar tradisional di Ambulu. Berangkat dari hal itu, maka peneliti mengambil judul “Implementasi Nilai-Nilai

⁵Berdasarkan Hasil observasi

Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan Perekonomian Pasar Tradisional Di Ambulu”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada konsep nilai-nilai Ekonomi Pancasila dan juga pemberdayaannya yang diterapkan pada perekonomian Pasar Ambulu. Oleh sebab itu, penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu?
2. Bagaimana pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah di Pasar Ambulu sudah menerapkan nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam aktifitas ekonominya.
2. Untuk mengetahui seperti apa bentuk pemberdayaan yang sudah diterapkan di Pasar Ambulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan mengenai teori Ekonomi Pancasila. Selain itu, untuk menggali lebih dalam lagi mengenai konsep teori Ekonomi Pancasila yang dulu pernah di populerkan

oleh mubyarto, agar lebih dikenal lagi baik oleh kalangan akademisi maupun rakyat Indonesia secara umum. Dan juga agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian dikemudian hari, baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Ekonomi Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya kepada penjual dan pembeli yang melakukan aktifitasnya di Pasar Ambulu. Sehingga diharapkan Ekonomi Pancasila bisa di praktikkan dalam aktifitas jual beli di Pasar Ambulu, hingga kemudian cita-cita menuju “masyarakat adil dan makmur” sebagaimana yang terkandung dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dapat segera tercapai.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna sebagaimana yang dimaksud peneliti. Beberapa hal yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

1. Perekonomian

Perekonomian yang dimaksudkan oleh peneliti disini adalah segala bentuk aktifitas jual beli yang selama ini dilakukan di pasar tradisional Ambulu.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh peneliti disini adalah proses pembangunan serta pengembangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian khususnya pada pasar tradisional di Ambulu.

3. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan saling enteraksi satu sama lain kemudian menentukan harga suatu barang di Pasar.⁶ Sedangkan pasar trsdisional yang dimaksudkan oleh peneliti yang sekaligus dijadikan sebagai objek penelitian adalah pasar tradisional yang bertempat dikecamatan ambulu, kabupaten Jember, atau yang sering disebut dengan istilah Pasar Ambulu.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan bab satu ini diakhiri sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu tentang Ekonomi Pancasila dan pemberdayaan perekonomian Pasar tradisional.

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

⁶ Wahyu Dwi Sutami, "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional", *BioKultur*, 2 (Desember 2012), 128.

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian lapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang bagaimana implementasi nilai-nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu dan bagaimana peberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu.

Bab V, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila dalam Pemberdayaamn Pasar Tradisioonal di Ambulu.



BAB II

Kajian Kepustakaan

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan dalam penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan implementasi Ekonomi Pancasila dan pemberdayaan perekonomian pasar tradisonal. Beberapa penelitian itu adalah:

- a. Faiz Rahman Wardana, “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam” (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.⁷

Fokus penelitian ini yaitu, yang pertama bagaimana pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta, kedua bagaimana pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad hatta ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, dan yang ketiga untuk mengetahui apakah sistem Ekonomi Kerakyatan masih relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara analisa kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian yaitu membaca atau menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk kemudian

⁷ Faiz Rahman Wardana, “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau Dari Perspektif Ekoonomi Islam” (Skripsi: Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016)

dilakukan analisis dan memperoleh kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Hasil penelitian ditemukan bahwa yang pertama, Ekonomi Kerakyatan yang digagas oleh Hatta memiliki tujuan kesejahteraan secara merata, keadilan serta semangat gotong royong dalam melakukan pembangunan ekonomi. Kedua, Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam tinjauan Ekonomi Islam sangat sejalan karena sama-sama ingin mencapai kesejahteraan secara merata bagi masyarakat dan sama-sama mengedepankan persoalan keadilan sebagai kunci dalam menentukan arah kebijakan. Ketiga, pemikiran Ekonomi Kerakyatan masih sangat relevan untuk diterapkan pada konteks perekonomian Indonesia saat ini. Sebab, Indonesia saat ini mengalami degradasi/krisis moral, keadilan dan kesejahteraan dalam sosio-ekonomi, tentunya Ekonomi Kerakyatan dengan membawa seperangkat instrumen perekonomian yang berasaskan Pancasila sangat perlu untuk digalakkan dan direalisasikan sebagai upaya untuk mengentaskan dari persoalan-persoalan tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang Ekonomi Rakyat, dengan metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Namun, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sedangkan peneliti menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan objek penelitian pada Pasar Ambulu. Selain itu, fokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini hanya

megupas konsep Ekonomi Kerakyatan menurut pemikiran Mohammad Hatta, sedangkan peneliti tidak terfokus pada pemikiran satu tokoh saja melainkan dari pandangan teori dari tokoh manapun.

- b. Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowo tengah, Sumber Baru Jember Indonesia” (2018), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.⁸

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya akan diarahkan untuk menggali dan mendalami potensi desa berbasis ekonomi kerakyatan dengan objek penelitian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif untuk memperoleh data yang terkait permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan diawali dengan reduksi data, analisis penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini ditemukan bahwa yang pertama, potensi Ekonomi Desa Rowotengah antara lain, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, potensi perikanan, potensi industri dan perdagangan. Kedua, cara pengembangan potensi

⁸ Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowo tengah, Sumber Baru Jember Indonesia”, *Fenomena*, 2 (Oktober 2018).

ekonomi tersebut bisa dilihat dari sisi permodalan, sisi teknologi tepat guna, dari sisi tenaga kerja, sisi pemasaran, sisi proses produksi dan dari sisi-sisi yang bisa dikembangkan. Ketiga, penyebab belum adanya legalitas dan produk belum bisa bersaing dengan pasar global adalah dikarenakan faktor sumber daya manusia khususnya pemilik usaha/potensi ekonomi yang masih merasa ribet jika berurusan dengan pemerintahan dan belum ada sentuhan dari pemerintah desa terkait pengembangan potensi ekonomi Desa Rowotengah. Keempat, desa Rowotengah menjadi desa yang potensial dan prospektif dalam persaingan pasar global, sehingga Desa Rowotengah bisa diproyeksikan menjadi desa mandiri, asalkan ada partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pisau analisa yang digunakan yaitu menggunakan Ekonomi Kerakyatan dan kesamaan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian, subjek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus dalam mencari potensi Desa di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi pasar tradisional di Pasar Ambulu Kabupaten Jember.

- c. Ita Risqani, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Pantai Payangan Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Dalam Persepektif Ekonomi Islam” (2016), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.⁹

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengelolaan wisata pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Kedua, bagaimana pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pengelolaan wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Ketiga, bagaimana pemberdayaan wisata pantai Payangan di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam Prespektif ekonomi Islam.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis penelitiannya menggunakan *Field Research*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, pengelolaan wisata pantai Payangan menggunakan ekowisata. Dimana ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta kesejahteraan lingkungan setempat. Kedua, strategi yang digunakan

⁹Ita Risqani, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Pantai Payangan Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. (Skripsi:Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016)

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pantai Payangan yaitu partisipasi dan kemandirian. Dan yang ketiga, pelaksanaan pemberdayaan wisata pantai Payangan disana masih belum menggunakan ekonomi Islam karena adanya ketidakadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat, fokus penelitian sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi dan juga kesamaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada lokasi dilakukannya penelitian dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya terletak pada Pantai Payangan Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat pada pasar tradisional yaitu Pasar Ambulu Kabupaten Jember.

- d. Kiki Aprilia Tiningsih, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Sewa Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” (2016), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.¹⁰

Fokus masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk transaksi usaha sewa rumah di Lingkungan Karang

¹⁰ Kiki Aprilia Tiningsih, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Sewa Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016)

Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kedua, bagaimana Strategi yang digunakan Masyarakat Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Ketiga, apakah usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui field research (penelitian lapangan) untuk menganalisis hukum islam terhadap usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masyarakat lingkungan Karang Mluwo. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, bentuk usaha sewa rumah yang dilaksanakan sangat beragam, dari mulai bentuk, tata cara system pengontrakannya, aqad, sampai pada system pembayaran. Kedua, strategi, yakni dengan berwirausaha usaha kecil seperti sewa rumah. Ketiga, usaha pemberdayaan ekonomi sesuai dengan hukum ekonomi islam, dibuktikan dari aqad yang digunakan adalah ijarah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat, fokus penelitian sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi dan juga kesamaan metode yang digunakan

untuk mengumpulkan data yakni menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui *field research* (penelitian lapangan).

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pada lokasi dilakukannya penelitian dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya terletak pada Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat pada pasar tradisional yaitu Pasar Ambulu Kabupaten Jember.

- e. Hartono Tasir Irwanto, “Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi” (2016). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.¹¹

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah peraturan tentang Mini Market dalam Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Perwujudan Sila Keadilan Sosial? Kedua, bagaimanakah bentuk penerapan sanksi bagi Mini Market yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagai Perwujudan Sila Keadilan Sosial?

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif dalam penelitian ini, menggunakan kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan petugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

¹¹ Hartono Tasir Irwanto, “Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi” (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016).

Makassar sebagai populasi penelitian, dan penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposing*.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah. Pertama, mini market sebagai bagian dari waralaba digolongkan sebagai pasar/toko modern. Sehingga, dapat kita bedakan antara toko modern dan toko yang terdapat pada pasar tradisional, yaitu kemandirian pelayanan dan kelengkapan jenis barang jualan. Kedua, berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan 66 izin usaha, pencabutan izin usaha, dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang implementasi Ekonomi Pancasila dalam perekonomian pasar. Namun, penelitian yang digunakan disini adalah kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sedangkan peneliti menggunakan studi lapang (*field research*) dengan objek penelitian pada Pasar Ambulu. Selain itu, rumusan, masalah yang terdapat pada penelitian ini megupas hukum dalam mewujudkan Ekonomi Pancasila dari segi perundang-undangan, sedangkan peneliti

tidak terfokus pada perundang undangan melainkan lebih menekankan implementasi di lapangan.

- f. Jumadin, “Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Di Desa Benua Utamas Kecamatan Benua Kabupaten Konawe selatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam” (2015). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.¹²

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pertama, apa saja jenis kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di desa Benua Utama Kecamatan Benua?. Kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di desa Benua Utama Kecamatan Benua?. Ketiga, bagaimana bentuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), bertujuan untuk mengungkapkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam persepektif Ekonomi Islam. Penelitian dilakukan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan.

Hasil penelitian ini adalah yang pertama, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang terdapat di Desa Benua Utama Kecamatan Benua adalah pada kegiatan PNPM mandiri, kelompok usaha bersama, pemberian pinjaman modal usaha, dan proyek padat karya. Kedua,

¹² Jumadin, “*Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Di Desa Benua Utamas Kecamatan Benua Kabupaten Konawe selatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam*” (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2015).

penerapan nilai-nilai Islamnya terletak pada tolong menolong dan semangat kebersamaan. Ketiga, bentuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam adalah Riba dan ketidakadilan.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan kesamaan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian, subjek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus dalam pemberdayaan Desa di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi pasar tradisional di Pasar Ambulu Kabupaten Jember.

- g. Nana Aditiya, “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1953-1972) Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Sejarah SMA Kelas XII” (2015). Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.¹³

Fokus dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengenai latar belakang pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta. Kedua, pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan. Ketiga, relevansi pemikiran Muhammad Hatta dalam perekonomian Indonesia, dan Implementasi terhadap sejarah SMA Kelas XII.

¹³ Nana Aditiya, “*Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1953-1972) Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Sejarah SMA Kelas XII*” (Skripsi: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Historis atau metode sejarah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Metode sejarah adalah proses heuristik, kritik, interpretasi, historiografi, direkonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan peristiwa fakta Sejarah.

Hasil penelitian adalah yang pertama, latar belakang Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta adalah Mohammad Hatta sebagai pelopor atau peletak dasar pemikir Ekonomi yang berdasar kerakyatan. Kedua Hatta memilih Koperasi sebagai jalan keluar bangsa Indonesia keluar dari masalah ekonomi yang dihadapi selama ini. Ketiga, relevansi pemikiran Mohammad Hatta dibidang ekonomi dan sosial, serta relevansi pemikiran Hatta dengan perekonomian yang terjadi di bangsa ini dan implementasi terhadap pembelajaran sejarah SMA kelas XII.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama membahas tentang Ekonomi Kerakyatan. Namun terdapat perbedaan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, sebab dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam pengumpulan data, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pendekatan sejarah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada aspek ekonomi.

- h. Muhammad Ali Akbar, Moh. Idil Ghufron, “Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam” (2019), Jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah Universitas Nurul Jadid.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang konsep ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem perekonomian yang memiliki kolerasi kuat dengan budaya asli yang berkembang di negara Indonesia dan tidak menyimpang dengan ajaran Islam. Pondasi utama dalam sistem tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan perekonomian Indonesia ke depan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian bahan-bahan yang bersumber dari berbagaimacam literature perpustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni berperan aktif mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pancasila dan ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil temuan dari penlitian ini ditemukan bahwa Berdasarkan pembahasan tentang esensi ekonomi pancasila dalam perspektif Islam, maka terdapat implikasi bahwa ekonomi pancasila merupakan perilaku ekonomi yang berpondasikan terhadap ideologi negara Indonesia yaitu pancasila. Ekonomi pancasila adalah usaha bersama yang berdasarkan gotong-royongan nasional dengan bertujuan

¹⁴ Muhammad Ali Akbar, Moh. Idil Ghufron, “Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam”, *Jurnal Mashrif al-Syariah*, 4 (2019).

untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi tujuan utama dari terbentuknya sistem ekonomi Pancasila. Dalam pandangan Islam, ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang sesuai dengan semangat Ekonomi Islam. Kedua sistem tersebut memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, dengan menaruh perhatian terhadap kondisi sosial disekitarnya.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pisau analisa yang digunakan yaitu menggunakan Ekonomi Pancasila dan kesamaan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian, subjek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus dalam mencari hubungan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam, sedangkan peneliti disini sedang menggali informasi tentang Implementasi Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu.

- i. Muhamad Bambang Triatmojo, Aloysius Rengga, “Evaluasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Rejomulyo Di Kota Semarang” (2019), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.¹⁵

¹⁵ Muhamad Bambang Triatmojo, Aloysius Rengga, “Evaluasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Rejomulyo Di Kota Semarang”, *Journal of Public Police an Management Review*, 8 (2019)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana program revitalisasi pasar Rejomulyo di Kota Semarang dan apa saja faktor penghambat program tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), bertujuan untuk mengungkapkan revitalisasi pasar tradisional yang bertempat di Rejomulyo Di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini ditemukan bahwa Program revitalisasi Pasar Rejomulyo merupakan program untuk menjadikan pasar lebih berdaya. Hal ini karena kondisi Pasar Rejomulyo lama sudah tidak layak, kumuh, kotor dan tidak sesuai persyaratan penyelenggaraan pasar sehat. Program ini berisi 2 kegiatan yaitu pembangunan fisik pasar dan penataan pedagang. Berdasarkan hasil penelitian program revitalisasi Pasar Rejomulyo masih belum optimal. Hal tersebut karena komponen context, kurang optimal sehingga menyebabkan process dan product yang belum optimal pula, meskipun input program sudah baik. Komponen context kurang optimal dilihat dari tidak adanya keterlibatan pedagang pada saat perencanaan program revitalisasi Pasar Rejomulyo sehingga pedagang tidak mengetahui isi program tersebut. Belum optimalnya process tersebut karena perencanaan program tidak melibatkan pedagang, sehingga kondisi sarana dan prasarana di pasar baru tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut mengakibatkan kelompok pedagang ikan basah menolak untuk

pindah, Product yang belum optimal dilihat dari kelompok pedagang ikan basah yang menolak pindah, sehingga berdampak pada kondisi pasar yang sepi karena hanya digunakan oleh pedagang bumbu. Tujuan program revitalisasi Pasar Rejomulyo yang untuk menjadikan pasar bersih, tertib, aman dan sehat pun juga belum tercapai. Dilihat dari kondisi pasar baru yang kurang bersih, masih terdapat pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan jenis jualannya, keamanan pasar juga belum optimal karena pos keamanan terlihat sepi, serta pasar yang direncanakan menjadi pasar sehat sesuai dengan keputusan menteri kesehatan masih terdapat beberapa komponen yang belum sesuai.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya sama sama membahas tentang ekonomi pasar tradisional serta metode penelitian juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian, subjek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus dalam mencari revitalisasi pasar tradisional, sedangkan peneliti disini sedang menggali informasi tentang Implementasi Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu.

- j. Dianidza Arodha, Institut Agama Islam Negeri Jember 2018 skripsi dengan judul “Ketahanan Ekonomi Masyarakat *Enclave* dalam Rangkai

Sistem Kekerabatan dan Solidaritas Sosial (Studi Kasus di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi)”¹⁶

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana ketahanan ekonomi dapat terbentuk dari adanya sistem kekerabatan di masyarakat *enclave* di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi?; 2) Bagaimana ketahanan ekonomi dapat terbentuk dari adanya solidaritas sosial di masyarakat *enclave* di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi?.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode analisis datanya menggunakan analisis data interaktif. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah ketahanan ekonomi dapat terbentuk dari adanya sistem kekerabatan di masyarakat *enclave* di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi terwujud dengan adanya kearifan lokal seperti adanya *maongge kajjuh, maongge beddih, ngembun*. Ketahanan ekonomi dapat terbentuk dari adanya solidaritas sosial di masyarakat *enclave* di Dusun Curah Bleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi terwujud dengan adanya *tahlilan, potean, lebenyu, sarween, dan sombengan-bhelin*.

¹⁶Dianidza Arodha, “Ketahanan Ekonomi Masyarakat Enclave dalam Rangkaian Sistem Kekerabatan dan Solidaritas Sosial (Studi Kasus di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti penelitian ini meneliti tentang ketahanan ekonomi masyarakat *enclave* di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi dengan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang implementasi ekonomi Pancasila di Pasar tradisional Ambulu dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Persamaannya adalah sama-sama mengangkat teori tentang ekonomi kerakyatan. Untuk metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan keabsahan data triangulasi.

Tabel 1.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Faiz Rahman Wardana, "PEMKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM"	Sama-sama membahas tentang Ekonomi Rakyat, dengan metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif.	Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (<i>library research</i>), sedangkan peneliti menggunakan studi lapang (<i>field research</i>) dengan objek penelitian pada Pasar Ambulu. Selain itu, fokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini hanya megupas konsep Ekonomi Kerakyatan menurut pemikiran Mohammad Hatta, sedangkan peneliti tidak terfokus pada pemikiran satu tokoh saja melainkan dari pandangan teori dari tokoh manapun.
2	Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, "MENGKALI POTENSI DESA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN; STUDI	Pisau analisa yang digunakan yaitu menggunakan Ekonomi Kerakyatan dan kesamaan metode yang digunakan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian, subjek

	DESA ROWO TENGAH, SUMBER BARU JEMBER INDONESIA”	dalam mengumpulkan data.	penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus dalam mencari potensi Desa di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi pasar tradisional di Pasar Ambulu Kabupaten Jember.
3	Ita Risqani, “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN PANTAI PAYANGAN DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM”	Terletak pada pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat, fokus penelitian sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi dan juga kesamaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.	Terdapat pada lokasi dilakukannya penelitian dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya terletak pada Pantai Payangan Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat pada pasar tradisional yaitu Pasar Ambulu Kabupaten Jember.
4	Kiki Aprilia Tiningsih, “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA SEWA RUMAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI LINGKUNGAN KARANG MLUWO KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER”	Terletak pada pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat, fokus penelitian sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi dan juga kesamaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui field research (penelitian lapangan).	Terdapat pada lokasi dilakukannya penelitian dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya terletak pada Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat pada pasar tradisional yaitu Pasar Ambulu Kabupaten Jember.
5	Hartono Tasir Irwanto, “PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI”	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang implementasi Ekonomi Pancasila dalam	Penelitian yang digunakan disini adalah kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Dalam

		perekonomian pasar.	penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (<i>library research</i>), sedangkan peneliti menggunakan studi lapang (<i>field research</i>). Selain itu, rumusan, masalah yang terdapat pada penelitian ini megupas Ekonomi Pancasila dari segi perundang-undangan, sedangkan peneliti tidak terfokus pada perundang undangan melainkan lebih menekankan implementasi di lapangan.
6	Jumadin, “PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI DESA BENUA UTAMAS KECAMATAN BENUA KABUPATEN KONawe SELATAN DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM”	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan kesamaan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.	Terdapat pada objek penelitian, subjek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus dalam pemberdayaan Desa di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi pasar tradisional di Pasar Ambulu Kabupaten Jember.
7	Nana Aditiya, “PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA (1953-1972) DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SEJARAH SMA KELAS XII”	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama membahas tentang Ekonomi Kerakyatan.	Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, sebab dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam pengumpulan data, sedangkan peneliti menggunakan penelitin kualitatif deskriptif. Selain itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pendekatan sejarah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada aspek ekonomi.
8	Muhammad Ali Akbar, Moh. Idil Ghufron,	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

	“SINKRONISASI EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI ISLAM”	dilakukan oleh peneliti adalah pisau analisa yang digunakan yaitu menggunakan Ekonomi Pancasila dan kesamaan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.	dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian, subjek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus dalam mencari hubungan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam, sedangkan peneliti disini sedang menggali informasi tentang Implementasi Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu.
9	Muhamad Bambang Triatmojo, Aloysius Rengga, “EVALUASI PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL REJOMULYO DI KOTA SEMARANG”	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya sama sama membahas tentang ekonomi pasar tradisional serta metode penelitian juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian, subjek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus dalam mencari revitalisasi pasar tradisional, sedangkan peneliti disini sedang menggali informasi tentang Implementasi Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu.
10	Dianidza Arodha, “KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT <i>ENCLAVE</i> DALAM RANGKAI SISTEM KEKERABATAN DAN SOLIDARITAS SOSIAL (Studi Kasus di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi)”	Persamaannya adalah sama-sama mengangkat teori tentang ekonomi kerakyatan. Untuk metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan keabsahan data triangulasi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini meneliti tentang ketahanan ekonomi masyarakat <i>enclave</i> di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi dengan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang implementasi ekonomi Pancasila di Pasar tradisional Ambulu dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

B. Kajian Teori

Memilih landasan teori menjadi sangat penting guna mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dan kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut:

a. Sejarah Ekonomi Pancasila

Kecendrungan dalam menolak berlakunya teori ekonomi Barat di Indonesia sebenarnya bukan fenomena yang baru terjadi pada tahun 1980-an. Sebelum Mubyarto membumikan Ekonomi Pancasila sebagai kritik penerapan teori ekonomi barat, pada masa kolonial beberapa sarjana belanda yang mengkaji perekonomian Hindia, juga telah melemparkan sejumlah keraguan atas kemampuan teori ekonomi konvensional dalam menjelaskan dinamika perekonomian ditanah jajahan.

Pada awal abad ke 20, Julius Herman Boeke mengajukan tesis mengenai “*Dual Economies*” (Ekonomi Dualistis) yang sekaligus mengawali munculnya gagasan mengenai teori baru bagi ilmu ekonomi di Indonesia, yang pada waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dalam penelitiannya yang ditulis pada 1910, yang berjudul *Tropisch-Koloniale Staathuishoudkunde: Het Probleem* (Masalah Perekonomian Kolonial Tropik), Boeke pertama kali memperkenalkan tesis mengenai ekonomi dualistis. Dari sudut pandang ekonomi, menurut Boeke, sebuah masyarakat dapat ditandai oleh tiga unsur, yaitu semangat sosial (*social*

spirit), bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan dalam kaitannya itu menentukan ciri khas dari masyarakat bersangkutan, yang disebut sebagai sistem sosial. Dalam sebuah masyarakat dimana pada waktu yang bersamaan memiliki dua atau lebih sistem sosial, dan tiap sistem itu berbeda satu sama lain, disebut masyarakat dualistis atau masyarakat plural (*plural societies*). Ekonomi dualistis merupakan implikasi dari sistem sosial yang juga bersifat dualistis. Dalam perekonomian yang bersifat dualistis, sebagaimana yang ada di Hindia Belanda, maka diperlukan dua pendekatan ekonomi yang berbeda untuk memahami dua modus perekonomian tadi, dimana teori ekonomi Barat tidak berlaku bagi sistem sosial yang bersifat khas.

Tesis Boeke tersebut kemudian mengundang banyak polemik dari para ekonom lain. Inti polemik tersebut adalah pada persoalan benarkah sistem sosial yang berbeda dengan masyarakat Barat, yakni tempat dimana ilmu ekonomi modern lahir dan dibesarkan, memerlukan teori ekonomi tersendiri yang berbeda dengan teori umumnya?. Di antara para ekonom yang terlibat dalam polemik itu adalah Jacob van Gelderen, Dionijs Huibert Burger, dan G.H. van der Kolff. Van Gelderen, dalam tulisannya mengenai perekonomian tropis, berpandangan bahwa teori ekonomi umum bukannya tidak berlaku sama sekali di Hindia Belanda. Ada keadaan-keadaan yang membuat kenapa sebuah teori kadang berlaku dan kadang tidak, dan itu tidak berarti membatalkan keabsahan sebuah

teori. Sebagai jalan tengah dari pandangan Boeke, van Gelderen mengemukakan bahwa di samping teori ekonomi murni, memang perlu pula dikembangkan teori ekonomi praktis atau aplikatif dalam bentuk kebijaksanaan ekonomi atau ekonomi-politik.

Lebih jauh, menurut van Gelderen, untuk memahami perekonomian Hindia, teori ekonomi umum memang tidak bisa langsung diterapkan begitu saja, karena ada beberapa faktor yang membuatnya berbeda dari kondisi yang diandaikan oleh teori ekonomi umum. Paling tidak ada tiga faktor yang disebut Boeke dan Gelderen dalam kaitannya dengan kondisi spesifik Hindia Belanda waktu itu, yaitu pertama, faktor sosial-historis Hindia Belanda itu sendiri, kedua adalah faktor geografi ekonomi, dan yang ketiga adalah faktor etnologi.¹⁷

Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi Indonesia secara komprehensif awalnya dimulai oleh Mohammad Hatta dengan bukunya yang berjudul “Ekonomi Terpimpin” yang diterbitkan pada tahun 1967. Dalam pemikirannya tersebut, Mohammad Hatta mengacu kepada pasal dalam UUD 1945, yakni pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 beserta penjelasannya. Namun demikian, konsep pemikiran dari Mohammad Hatta tersebut tidak kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah dokumen resmi mengenai suatu sistem ekonomi yang dianut oleh Negara Indonesia.

¹⁷ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyorto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 54.

Pada waktu yang bersamaan dengan ditulisnya buku itu oleh Mohammad Hatta, di Indonesia sedang berlaku sistem Ekonomi Terpimpin yang berdampingan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam persepsi masyarakat, karena yang memimpin ekonomi adalah negara dan pemerintah yang menganut Demokrasi Terpimpin, maka dikhawatirkan mengandung unsur otoritarianisme, atau bahkan kediktatoran. Artinya, di dalam persepsi masyarakat, sistem ekonomi Indonesia dikhawatirkan terdapat unsur kontrol, komando dan perencanaan terpusat yang kesemuanya bergabung menjadi dirigisme¹⁸. Sementara itu, dalam pengertian Hatta, Ekonomi Terpimpin adalah orde ekonomi yang dipimpin oleh pasal-pasal ekonomi UUD 1945.

Sejak tahun 1967, Pemerintah Indonesia yang disebut sebagai Pemerintah Orde Baru, mulai menjalankan suatu strategi pembangunan yang komprehensif berdasarkan TAP MPRS NO. XXIII/1966 tentang “Pembaharuan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan” yang menjadi landasan legalnya. Sekalipun tidak disebut dianutnya suatu sistem ekonomi tertentu, namun dalam konsep pembangunan itu terkandung unsur-unsur sistem ekonomi, misalnya landasan ideologi dan hukum, lembaga-lembaga ekonomi, pranata ekonomi dan sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan. Oleh sebab itu, secara implisit pemerintah Indonesia sedang mengembangkan suatu sistem ekonomi tertentu, tapi masih bersifat arsitektural.

¹⁸ Dirigisme adalah doktrin ekonomi dimana negara memainkan peran arahan yang kuat, yang bertentangan dengan peran regulasi semata, daripada peran ekonomi kapitalis.

Pada saat itu, corak yang menonjol ada dua. Pertama adalah gagasan ekonomi liberal yang tercermin dalam kebijaksanaan liberalisasi ekonomi, sebagaimana tercermin dalam Peraturan 3 Oktober 1967, UU Penanaman Modal Asing, 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri, 1968. Kedua adalah dilaksanakannya sistem perencanaan terpusat (*centralized planning system*) yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga mencerminkan suatu sistem yang dualistis sebagai suatu perpaduan antara gagasan liberal dan keterpimpinan atau dirigisme.¹⁹

Kemudian, pada tahun 1965 Emil Salim mempublikasikan dua karangan mengenai Ekonomi Pancasila, yaitu satu dalam bentuk monografi yang diterbitkan oleh Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas), dan yang satu lagi dalam bentuk bab pada sebuah buku yang juga diterbitkan oleh Leknas dan secara khusus dipersembahkan kepada para peserta Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

Didalam karangannya yang pertama, Emil Salim membahas empat sistem ekonomi, diantaranya Ekonomi Swasta, Ekonomi Kontrol, Ekonomi Kolektif, dan Ekonomi Perencanaan Sentral. Pembahasan mengenai model sistem dan teori-teori ekonomi tersebut dilakukannya untuk mencari dan merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan Indonesia.

¹⁹ M. Dawam Rahardjo, "Menuju Sistem Perekonomian Indonesia", *LSAF*, 72 (Desember, 2009), 113.

Meskipun yang pertama kali memperkenalkan istilah Ekonomi Pancasila adalah Emil Salim, namun dalam perjalanannya, istilah tersebut lebih melekat pada sosok Mubyarto. Sebab, Mubyarto-lah yang benar-benar menyeriusi dalam mengembangkan gagasan Ekonomi Pancasila tersebut. Hingga kemudian, atas inisiasi Mubyarto, pada tanggal 19 September 1980, gagasan Ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan, yakni sekaligus memperingati hari lahir Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) yang ke-25.²⁰

Dari kedua pemikir tersebut, yakni antara Emil Salim dan Mubyarto, kendatipun sama-sama menggunakan istilah Ekonomi Pancasila, namun terdapat perbedaan mendasar antara apa yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila menurut pandangan Emil Salim dengan menurut Mubyarto. Jika Emil Salim, menerjemahkan istilah Ekonomi Pancasila sebagai gagasan sistem perekonomian, atau politik perekonomian. Sedangkan Mubyarto, menggunakan Ekonomi Pancasila sebagai bentuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi Neoklasik (*mainstream economics*). Artinya, perbedaan pokok antara gagasan Emil Salim dengan Mubyarto itu terletak pada aspek konseptual dan historis yang melatari kelahiran istilah tadi. Secara historis, gagasan Ekonomi Pancasila Emil Salim adalah mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi yang akan diambil oleh Orde Baru. Sebaliknya, Ekonomi

²⁰ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 48.

Pancasila Mubyarto justru hendak memberikan kritik terhadap jalan ekonomi Orde Baru.

Pemikiran tentang ekonomi Pancasila dengan segala liku-likunya mengalami perkembangan terus-menerus. Meskipun bagi sebagian orang awam mungkin dipandang terlalu lamban, atau bahkan bagi sebagian ahli dianggap maju-mundur, namun pergerakannya tidak berhenti. Bila hanya ada satu perbedaan besar antara sistem ekonomi Pancasila dan system ekonomi yang masih belum sempurna yang sekarang masih berlaku di negara kita, maka system ekonomi Pancasila haruslah lebih berkeadilan sosial.²¹

b. Pengertian Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang bersumber pada ideologi Pancasila dengan cara mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang sekaligus bersifat moralistik (mengacu pada Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjamin ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional. Dalam sistem Ekonomi Pancasila kita menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem Ekonomi Kapitalis Liberal. Sistem yang lebih tepat adalah sistem ekonomi yang berdasar asas kekeluargaan.²²

²¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 7.

²² A. Sofyan Alnashr, "Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam" *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 194.

Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi yang dikerjakan dalam bentuk usaha-usaha bersama dengan dilandasi berdasarkan asas-asas kekeluargaan.²³ Menurut Kartasasmita Ekonomi Pancasila berakar dari bumi Indonesia. Menurutnya, dalam Ekonomi Pancasila tidak mengenal “*economic animal*” yang satu memangsa yang lain. Kartasasmita mendefinisikan pengertian Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialis, karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral, dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etik, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak”.

Swasono dengan jelas memberikan definisi dan landasan

Ekonomi Pancasila dalam makalahnya yang berjudul “Orientasi Ekonomi Pancasila” dalam *Wawasan Ekonomi Pancasila* (1981):

“Ekonomi Pancasila adalah Pandangan filsafat dibidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini. Jika Pancasila adalah khas Indonesia, maka Ekonomi Pancasila adalah khas Indonesia. Secara *normatif*, landasan daripada Ekonomi Pancasila adalah apa yang terkandung di dalam Pembukaan, pasal 23, 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945”

Mubyarto dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pancasila*:

Lintas Pemikiran Mubyarto (1997: 77) mendefinisikan sistem Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

²³ A. Sofyan Alnashr, “Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam” *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 201.

“Sistem Ekonomi Pancasila ialah suatu sistem “ideal” atau “idaman” yang didalamnya antara lain kita temukan semangat usaha bersama yang kuat diantara pelaku-pelaku ekonomi. Jika dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan koperasi merupakan bentuk perusahaan yang sesuai maka haruslah diartikan bahwa, dibanding perusahaan negara dan perusahaan swasta, koperasi adalah wadah paling mudah untuk mewujudkan semangat usaha bersama”.²⁴

Panjangaran atas pengembangan pemikiran, teori, dan sistem

Ekonomi Pancasila diatas menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila adalah konsep normatif atas kondisi ekonomi dunia yang tidak berpihak pada realitas bangsa Indonesia. Secara umum, Ekonomi Pancasila, sebagaimana bisa terbaca dari tulisan para penggagasnya, dimaksudkan sebagai teori ekonomi dengan perspektif Indonesia. Secara konseptual gagasan Ekonomi Pancasila diproyeksikan mencakup dua aspek, yaitu sebagai teori ekonomi murni dan juga sebagai teori ekonomi aplikatif untuk Indonesia.

Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu solusi moral dan politik untuk mendekonstruksi ekonomi penindasan kolonial menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional.²⁵ Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Namun dewasa ini, kita belum menggunakan model sistem ekonomi tersebut, sebab hal ini hanya bersifat sementara. Karena nantinya Indonesia akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh.²⁶

²⁴ Hastangka, “Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto”, *Jurnal Filsafat*, 1 (April, 2012), 40.

²⁵ Sri-Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: Universitas Sriwijaya Press, 2015), 106.

²⁶ Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UIP, 1980), 98.

c. Filosofis Ekonomi Pancasila

Meski bisa dikatakan gagasan Ekonomi Pancasila bukanlah gagasan Mubyarto seorang, tapi dalam kenyataannya Ekonomi Pancasila telah menjadi nama kedua bagi Mubyarto, dan kiranya demikian pula sebaliknya. Merujuk kepada penjelasan Mubyarto, Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu pada setiap sila pancasila. Jika sila pancasila dijabarkan maka, sila *ketuhanan yang maha esa* memiliki makna ekonomi harus mendasarkan diri pada moral, karena Tuhanlah yang seharusnya menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini. Kedua, *kemanusiaan yang adil dan beradab*, artinya ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil, menganggap sama semua manusia, satu dengan yang lain tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan atau hak yang lebih tinggi. Ketiga, *persatuan Indonesia*, ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi, bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan napas nasionalisme. Keempat, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, ini adalah prinsip demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang, meski dia itu miskin ataupun lemah, tetap harus diikutsertakan dalam tiap pembuatan kebijakan. Kelima, *keadilan sosial*, ini sudah jelas yang dituju.

Jadi, jika lima sila tersebut kita peras secara analitis, maka sila pertama dan sila kedua menjadi dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan. Kemudian, sila ketiga dan empat adalah caranya, berupa nasionalisme

dan demokratis. Lalu sila kelima adalah tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁷

Keadilan Sosial merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²⁸

Kerangka filosofis Ekonomi Pancasila bertitik tolak pada sila-sila Pancasila. Pemahaman tentang nilai-nilai dan sila-sila Pancasila menjadi ukuran untuk menerjemahkan mekanisme atau proses kerja Ekonomi Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa dan dasar negara mempunyai peranan penting dalam praktek berekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan ilmu ekonomi Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila, sekurang-kurangnya memiliki lima ciri pokok, yakni yang pertama, ekonomi “disusun” bukan “tersusun” artinya tidak menyerahkan seluruhnya pada mekanisme pasar. Kedua,

²⁷ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyorto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

²⁸ A. Sofyan Alnashr, “Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam” *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 204.

dilaksanakan sebagai usaha bersama. Ketiga, negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun tidak menampilkan peranan masyarakat (swasta). Keempat, kegiatan produksi dilaksanakan pada atas dasar kepemilikan dan kepemilikan anggota masyarakat. Kelima, modal ekonomi tidak terbatas pada modal kapital, namun juga modal intelektual, modal lingkungan, modal budaya, dan modal sosial.

Pancasila sebagai landasan filosofis sistem perekonomian nasional mengisyaratkan bahwa *founding father Indonesia* memimpikan sebuah prinsip kebersamaan memuat nilai luhur dalam melihat nilai luhur manusia sebagai hakikat hidup berbangsa. Ada tiga makna dasar dari esensi kebersamaan, yakni pengakuan kedaulatan rakyat dalam berekonomi, kesetaraan sebagai bagian dari peri kemauniasaan dan peri keadilan, dan kemandirian sebagai jati diri bangsa.

Maka dari itu, sikap dasar mengutamakan kepentingan pribadi perorangan sebagai sukma kapitalisme itulah yang ditentang oleh *founding father* kita. Ide ini sama dengan pendapat Mohammad Hatta yang menegaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama dari pada kemakmuran orang seorang. Pandangan ini kemudian dirumuskannya kedalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu ciri paling utama dari “demokrasi ekonomi” di Indonesia.

Lebih jauh lagi, dalam undang-undang tersebut Hatta mengemukakan dalam prasarannya pada Konferensi Ekonomi di Yogyakarta tahun 1946, sebagai berikut: perekonomian suatu negeri pada

umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama, kekayaan tanahnya. Kedua, kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan Internasional. Ketiga, sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya. Terhadap bangsa Indonesia harus ditambah satu pasal lagi, yaitu sejarahnya sebagai tanah jajahan.²⁹

Dasar moral Ekonomi Pancasila mengedepankan gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sejalan, sesuai, dan setia pada asas-asas Pancasila, sedangkan dasar moral ekonomi Smith adalah kebebasan individu. Namun demikian, Mubyarto juga mengakui bahwa Ekonomi yang dikembangkannya merujuk pada ajaran asli ilmu ekonomi Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi yang tidak terlepas dari faktor etika dan moral karena didalam tulisan Smith yang pertama (*The Theory of Moral Sentiment*, terbit pada 1759) dijelaskan bahwa manusia adalah *homo socius*. Kemudian dalam bukunya yang kedua, *Wealth of Nations (An Inquiru into the Nature and Causes of the Wealthof Nations*, terbit pada 1776) Smith menulis bahwa manusia hanya *homo economicus*. Sedangkan yang di ajarkan kepada mahasiswa di Indonesia menurut Mubyarto hanya terbatas pada *homo economicus*.

Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila memiliki lima ciri, yaitu yang pertama, roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah

²⁹ Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018),20.

kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan. Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Kelima, adanyaimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih dicari-cari tetapi harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini dianut oleh bangsa Indonesia, terutama pada masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan. Ekonomi Pancasila menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem ekonomi kapitalis liberal. Sebab, Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah menolak penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, dan individualisme. Sistem ekonomi yang menganut asas kekeluargaan juga dapat diartikan membangun perekonomian secara mandiri, dengan pengertian tidak diperbolehkan menggantungkan pada asing.³⁰

Dalam agama Islam, juga menjelaskan bahwa keadilan sosial adalah tuntutan mutlak dalam ajaran Islam, baik rumusan “hendaklah

³⁰ A. Sofyan Alnashr, “Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam” *Jurnal Islamic Review*, 4 (A, pril, 2015), 205.

kalian bertindak adil (أَنْتَعِدُوا)” maupun keharusan yang menjelaskan “menegakkan keadilan (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ),” berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci al-Quran.³¹ Secara umum, Islam memang memperhatikan susunan masyarakat yang adil dengan membela nasib mereka yang miskin/lemah, seperti terlihat dalam ayat suci berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

Artinya: Apa yang dilimpahkan (dalam bentuk pungutan *fai*’) oleh Allah atas kaum (penduduk sekitar madinah), maka harus digunakan bagi Allah, utusan-Nya, sanak keluarga terdekat, pengemis dan pejalan kaki di jalan Allah. Agar supaya harta yang terkumpul itu tidak hanya berputar/beredar dikalangan orang-orang kaya saja dilingkungan kalian. (Qs al-Hasyr [59]:7).³²

d. Dasar Yuridis Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila Mubyarto memiliki landasan yuridis konstitusional, sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara Indonesia, yang letaknya pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, maka seluruh isi jiwa UUD 1945 harus ditafsirkan sesuai dengan falsafah Pancasila. Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem guna mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang menyangkut bidang ekonomi, tercantum dengan jelas pada Bab XIV, pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

³¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam, 2006), 168.

³² *Ibid.*, 171.

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Didalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD) 1945, tentang pasal 33 tersebut, dapat dinyatakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau perilaku anggota-anggota masyarakat.
- 2) Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.
- 3) Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
- 4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
- 5) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi Indonesia, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³

³³ Mubyarto, Boediono, *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPFE, 1981), 125.

Pasal 33 tersebut sudah jelas memberikan legalitas terhadap penyusunan perekonomian bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila yang disusun oleh Mubyarto sudah memiliki fondasi yuridis pada waktu itu untuk dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sistem ekonomi, dan pengembangan teori ekonomi alternatif di Indonesia.

Berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan pada pasal 33 diatas, dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem Ekonomi Pancasila. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam Ekonomi Pancasila antara lain meliputi tujuh hal. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, di implementasikan dalam bentuk pengembangan koperasi atau usaha kecil milik rakyat lainnya, sebagaimana terkandung dalam pasal 33 ayat 1.
- 2) Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, di implementasikan dalam bentuk pengembangan BUMN, sebagaimana terkandung dalam pasal 33 ayat 2.
- 3) Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana terkandung dalam pasal 33 ayat 3.

- 4) Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, di implementasikan dalam bentuk memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi.
- 5) Menjaga stabilitas moneter.
- 6) Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana terkandung dalam pasal 27 ayat 2.
- 7) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana terkandung dalam pasal 34.³⁴

Kemudian, dalam perkembangannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dengan amandemen Undang Undang Dasar pada tahun 2002. Dalam naskah asli Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 tersebut dituangkan pada Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial, sedangkan berdasarkan hasil Amandemen pada tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada Bab XIV dengan mengalami perubahan judul menjadi Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial.

Bunyi ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, hasil amandemen tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Perekonomian di susun sebagai sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

³⁴ Revrisond Baswir, "Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme", *Gema Keadilan*, 2 (September, 2015), 4.

- 3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pengertian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, apabila diperhatikan dengan seksama, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, pembangunan yang besar dikerjakan oleh Pemerintah atau dipercayakan kepada badan hukum yang tertentu di bawah penguasaan pemerintah. Hal ini dilakukan berdasarkan pedomannya mencapai "... sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, pembangunan yang kecil-kecil dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Hingga kemudian, koperasi dapat berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.³⁵

Dari pokok-pokok unsur yang terkandung dalam penjelasan tersebut diatas bahwa sifat-sifat dan ciri-ciri sistem ekonomi yang harus disusun adalah adanya demokrasi ekonomi, kemakmuran

³⁵ Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 9 (Maret, 2012), 62.

masyarakat/sosial, asas kekeluargaan, ikut campurnya negara secara langsung dalam pengurusan cabang-cabang produksi dan sumber-sumber alam yang penting. Sifat-sifat dan ciri-ciri yang demikian tidak terdapat dalam sistem kapitalisme. Pun demikian, tidak semua sifat-sifat dan ciri-ciri yang demikian terdapat pada sistem sosialismenya negara-negara lain, tetapi semua sifat-sifat dan ciri-ciri terdapat didalam situasi, kondisi dan kepribadian Indonesia. Sehingga demikian, ekonomi yang sesuai dengan perumusan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, dan yang sesuai dengan Pancasila adalah Ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila harus selalu berjalan sejajar dengan prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip demokrasi ekonomi harus berdasarkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi yang didasarkan dengan demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan.³⁶

e. Tantangan Sistem Ekonomi Pancasila

Indonesia adalah sebuah negara yang telah mengalami penjajahan selama 3,5 abad, tentu tidak dapat mengingkari kenyataan telah terbangunnya struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia. Sebab, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengoreksi struktur perekonomian yang bercorak kolonial tersebut. Selain itu, liberalisasi bukan hal baru bagi

³⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2018), 20.

Indonesia, tetapi telah berlangsung sejak era kolonial. Dari sini sangat jelas bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk menerapkan sistem ekonomi yang sesuai, bukanlah perjuangan yang mudah, karena kendala terbesar justru datang dari pihak kolonial.

Kemudian, setelah bangsa Indonesia merdeka, pihak kolonial hampir terus menerus menjatuhkan upaya bangsa Indonesia dalam usaha menerapkan ekonomi yang sesuai untuk bangsanya sendiri. Secara ringkas, yang dilakukan oleh pihak kolonial untuk mencegah terselenggaranya ekonomi yang sesuai itu adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya agresi I dan II pada 1947 dan 1948. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah berdirinya NKRI yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Kedua, dipaksanya bangsa Indonesia untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Ketiga, syarat ekonomi itu adalah:

- 1) Bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.
- 2) Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
- 3) Bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Ketiga, dilakukannya berbagai tindakan adu domba menyusul dilakukannya tindakan pembatalan KMB secara sepihak oleh pemerintah

Indonesia pada 1956. Tindakan-tindakan itu antara lain terungkap pada meletusnya peristiwa PRRI/Permesta pada 1958. Keempat, diselundupkannya sejumlah sarjana dan mahasiswa ekonomi Indonesia ke AS untuk mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak liberal-kapitalistis sejak 1957. Para ekonom yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley ini sengaja dipersiapkan untuk mengambil alih kendali pengelolaan perekonomian Indonesia pasca penggulingan Soekarno pada 1966. Kelima, dilakukannya sandiwara politik untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno pada 30 September 1965, yaitu pasca terbitnya UU No. 16/1965 pada Agustus 1965, yang menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia.

Keenam, dipaksanya Soekarno untuk menandatangani empat UU sebelum ia secara resmi dilengserkan dari kekuasaannya. Keempat UU itu adalah:

- 1) UU No. 7/1966 tentang penyelesaian masalah utang-piutang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.
- 2) UU No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota ADB.
- 3) UU No. 9/1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia.
- 4) UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Ketujuh, dibangunnya sebuah pemerintahan kontra-revolusioner di Indonesia sejak 1967. Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini, para ekonom “Mafia Berkeley” yang sejak jauh-jauh hari

telah dipersiapkan oleh AS, secara sistematis berusaha membelokkan orientasi penyelenggaraan perekonomian Indonesia dari ekonomi yang berbasis kerakyatan menuju ekonomi pasar neoliberal. Tindakan pembelokan orientasi tersebut didukung sepenuhnya oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB dengan cara mengucurkan utang luar negeri.

Kedelapan, dilakukannya proses liberalisasi besar-besaran sejak 1983, yaitu melalui serangkaian kebijakan yang dikemas dalam paket deregulasi dan debirokratisasi. Kesembilan, dipaksanya Soeharto untuk menandatangani pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara terinci melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan IMF pada 1998, yaitu sebelum ia secara resmi dipaksa untuk mengakhiri kekuasaannya melalui sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan reformasi. Perlu diketahui, dalam sejarah perekonomian Inggris, gerakan reformasi serupa dimotori antara lain oleh David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Thomas R. Malthus, dan John S. Mill (Giersch,1961). Kesepuluh, pada 2002, dilakukannya amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Ekonomi Pancasila. Melalui perdebatan yang cukup sengit, ayat 1, 2, dan 3, berhasil dipertahankan.³⁷

Kendatipun upaya dalam menggantikan pasal 33 dengan sistem ekonomi pasar tidak berhasil, namun telah terjadi penambahan pada pasal 34 dengan pasal-pasal kesejahteraan sosial. Sungguh pun demikian, jika

³⁷ Revrison Baswir, "Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme", *Gema Keadilan*, 2 (September, 2015), 5.

penjelasan pasal 33 berhasil dihilangkan, maka pasal ini menjadi terkebiri terutama menyangkut konsep demokrasi ekonomi dan kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional. Bahkan, seandainya telah terjadi penghapusan pasal ekonomi tersebut, maka Ekonomi Pancasila akan kehilangan dasar pijakan pula, sehingga konsep Ekonomi Pancasila akan berakhir.

Pada tataran praktik, awal diterapkannya paham ekonomi liberal yakni pada april 1967, tiga bulan setelah pemberlakuan Undang-Undang Penanaman modal Asing (UU PMA) No 1/1967, *Freeport Sulphur Incorporated* menandatangani sebuah kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambah cadangan emas dan tembaga di Irian Jaya, dengan memperoleh masa bebas pajak selama tiga tahun serta konsesi pajak sebesar 35 untuk tujuh tahun berikutnya dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain lima persen pajak penjualan. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontraknya di Indonesia sekaligus menandai awal perubahan sistem Ekonomi Indonesia Menjadi Liberal. Hingga kemudian, di bawah bendera globalisasi, dan dalam tekanan kebutuhan penerimaan APBN dan pembayaran hutang luar negeri, telah terjadi proses privatisasi perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar ke tangan modal

asing. Yang menjadi sasaran privatisasi ini adalah BUMN yang kini jumlahnya berkurang dari 240-an menjadi 130-an.³⁸

f. Landasan Sosial Ekonomi

Dalam sebuah perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, adalah sebuah keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip kekeluargaan, gotong royong dan kemandirian.

1) Kekeluargaan

Di Indonesia konsep kekeluargaan pada dasarnya sudah terimplementasikan sejak zaman dahulu, sebab prinsip kekeluargaan ini merupakan cirihas masyarakat Nusantara yang sangat memegang adat “ketimuran”. Jika prinsip kekeluargaan ini diterapkan pada sistem perekonomian maka perekonomian tersebut akan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan pilihan akhir dari peradaban manusia ditengah ancaman ekonomi dunia.

2) Gotong Royong

Setelah prinsip kekeluargaan sudah diterapkan, selanjutnya adalah penerapan prinsip gotong royong, sebab gotong royong adalah buah dari semangat kekeluargaan yang memiliki ciri kesetaraan. Bahkan, gotong royong juga merupakan bentuk dari prinsip kekeluargaan yang terjalin. Tanpa adanya landasan gotong royong, Ekonomi Pancasila tidak akan terimplementasikan dengan baik.

³⁸ M. Dawam Rahardjo, “Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Pancasila”, *UNISIA*, 53 (Maret 2004), 211.

3) Kemandirian

Kemandirian adalah buah dari prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang sudah terimplentasikan. Oleh sebab itu, kemandirian menjadi penting maknanya karena bisa menjadi sekema bangsa, khususnya dalam pencapaian kesejahteraan umum atau dalam undang-undang sering kita sebut dengan istilah “masyarakat adil dan makmur” sebagaimana yang dicita-citakan.³⁹

g. Pemberdayaan Ekonomi

Swasono mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional. Sehingga, langkah-langkah yang nyata harus di upayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Sedangkan yang dinamakan kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut

³⁹ Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya, Jakad Publishing, 2018), 25.

keperluan mutlak syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.⁴⁰

Pemberdayaan ekonomi dianggap sebagai sebuah strategi pembangunan yang banyak banyak diterima oleh masyarakat, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan dalam kebijakan pemerintah. Dilain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah masih belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Di Indonesia, pola pembangunannya terlalu berorientasi pada pertumbuhan. Selama rezim orde baru berkuasa dan dengan semangat sentralisme kekuasaan yang kuat telah menanamkan bibit-bibit

⁴⁰ Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2,8.

⁴¹ Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi", *MODERNISASI*, 5,(Juni 2009), 118.

ketidakpuasan dan sekaligus konflik sosial sebagai bom waktu di berbagai daerah. Diskursus model pembangunan tahun 80-an yang bertumpu pada masyarakat (*people centered development*) yang bertujuan untuk pemberdayaan rakyat, ternyata hanya sekedar wacana dan kenyataannya kapitalisme semu justru menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial.⁴²

h. Pengertian Pasar

Pasar merupakan tempat berkumpulnya sejumlah penjual dan pembeli di mana terjadi transaksi jual-beli barang ataupun jasa yang ada di sana. Menurut cara transaksinya pasar dibedakan menjadi dua, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan pokok. Sedangkan di pasar modern, barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri.⁴³

Transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di pasar sudah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan volume dari transaksi tersebut.⁴⁴ Proses bertemunya penjual dan pembeli pada pasar menjadi indikator tingkat perekonomian masyarakat. Sebab, semakin besar volume transaksi yang terjadi di suatu pasar menunjukkan

⁴² Hg. Suseno tw, "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Ukm Dan Entrepreneurship Di Kalangan Pengusaha Kecil" *Jurnal widya manaiemen & akuntansi*, 3 (april 2003), 64.

⁴³ Nel Arianty, "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1 (April 2013), 18.

⁴⁴ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2015), 44.

perekonomian yang stabil. Bahkan, kegiatan ekonomi yang terjadi di sebuah pasar merupakan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.⁴⁵ Namun, dewasa ini pengertian tersebut tidaklah sepenuhnya benar, karena seiring kemajuan teknologi penjual dan pembeli dapat melakukan aktifitas jual beli dengan cara tidak bertemu secara langsung.

Didalam pasar, terdiri dari semua pelanggan yang memiliki berbagai macam kebutuhan atau keinginan, yang kemudian melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Aktifitas pertukaran barang atau jasa ini merupakan bagian dari perekonomian. Sedangkan pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut transaksi. Sebuah pasar muncul karena dibangun atas interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

i. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut Perpres No.112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil

⁴⁵ Afif Noor, "Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern", *Evonomica*, 4 (November, 2013), 110.

dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.⁴⁶ Sedangkan menurut Wikipedia⁴⁷, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjualan dan pembelian secara langsung dan biasanya melalui proses tawar-menawar. Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Pedagang di pasar tradisional ini kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan atau pedesaan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.⁴⁸

j. Keunggulan Pasar Tradisional

Didalam sebuah pasar tentu memiliki kelebihan serta kekurangan. Pun yang terjadi pada pasar tradisional. Adapun keunggulan yang ada pada pasar tradisional diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, pembeli memiliki kesempatan untuk melakukan tawar menawar. Dengan adanya tawar menawar ini, membuat penjual dengan pembeli akan terjadi sebuah interaksi sosial. Sehingga diantara penjual dan pembeli akan saling

⁴⁶ Anung Pramudyo, "Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta", *JBMA*, 2 (Maret, 2014), 82.

⁴⁷ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional

⁴⁸ Anung Pramudyo, "Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta", *JBMA*, 2 (Maret, 2014), 82.

bertegur sapa, bahkan ada sentuhan humanis, hingga kemudian mempunyai kedekatan personal maupun emosional. Didalam pasar tradisional, terkadang antara penjual dan pembeli sudah saling mengenal dengan baik, bahkan mengenal keluarganya masing-masing dan saling mengundang jika mempunyai hajatan. Hal ini tentunya tidak akan kita dapatkan apabila berbelanja di pasar modern.

Keunggulan yang kedua adalah masalah kualitas. Kualitas yang dimaksud disini dikaitkan dengan kesegaran barang yang dijual, misalnya untuk sayur-mayur, daging, dan ikan. Sehingga, pembeli yang teliti akan dengan mudah mendapatkannya dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasar modern. Ketiga, pasar tradisional juga buka lebih pagi jika dibandingkan dengan pasar modern. Bahkan, sejak dinihari kegiatan perekonomian di pasar tradisional sudah dimulai. Keempat, yang menjadi keunggulan pasar tradisional adalah konsumen akan dengan cepat mengetahui adanya perubahan naik turunnya harga. Bahkan konsumen akan dengan cepat dapat membandingkan harga antara penjual yang satu dengan penjual lainnya, dengan demikian konsumen akan mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya, tentunya dengan harga yang lebih murah.

Sementara itu, pasar tradisional merupakan cerminan dari keberadaan kehidupan sosial di dalam suatu wilayah tertentu. Pasar tradisional juga merupakan pusat kebudayaan, dimana segala macam ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terekspresikan

didalamnya. Intensitas interaksi di dalam pasar tradisional tidak akan kita temukan di pasar modern.

Pasar sebagai pusat budaya terlihat karena Pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang jual beli. Tetapi lebih daripada itu, pasar tradisional menjadi ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam upaya membangun wawasan kebangsaan untuk ikut membangun suatu bentuk kebudayaan masa depan yang tak lepas dari akar tradisinya yakni “Gotong Royong”.⁴⁹



⁴⁹ Anung Pramudyo, “Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta”, *JBMA*, 2 (Maret, 2014), 84.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data dan cara analisa menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik dan pengumpulan data.⁵⁰

Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh para penjual dan pembeli yang melakukan aktifitas jual belinya di pasar tradisional Ambulu. Baik perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh. Selain itu, peneliti juga melihat secara langsung kondisi obyektif yang ada di Pasar Ambulu, agar peneliti

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 9.

mengetahui bagaimana fakta, realita, gejala, dan peristiwa yang terjadi di pasar Ambulu. Hingga kemudian, peneliti dapat mengetahui bagaimana Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu, serta dapat mengetahui bagaimana peberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat pada pasar tradisional di Ambulu. Pasar Ambulu adalah salah satu pasar rakyat yang terdapat di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang didirikan sekitar tahun 1978-an. Pasar ini merupakan pasar yang menopang ekonomi rakyat di daerah ambulu dan sekitarnya, yang lokasinya berada di alun-alun Kecamatan Ambulu. Pasar Ambulu adalah pasar tradisional yang sangat potensial melayani kebutuhan masyarakat khususnya di Jember selatan. Karena letaknya berada di jember selatan alias jauh dari pusat kota, maka Pasar Ambulu menjadi salah satu andalan perbelanjaan di Jember selatan.

Di pasar ini terdapat banyak pedagang dengan berbagai jenis dagangannya. Adapun barang yang dijual merupakan kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran, beras, ikan dan kebutuhan dapur lainnya. Selain itu, berbagai macam jenis pakaian juga tidak luput dijual di Pasar Ambulu ini. Dari banyaknya pedagang disini, tentunya harga yang ditawarkan dari tiap pedagang sangatlah variatif dan juga masih menerapkan sistim tawar menawar dalam menentukan harga. Namun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong

antar sesama pedagang, ketidak samaan harga tersebut tidaklah menyebabkan salah satu pedagang merasa dirugikan.

Alasan memilih lokasi ini karena Pasar Ambulu adalah merupakan pasar tradisional yang bertempat di Kecamatan Ambulu, yang mampu menopang seluruh kebutuhan masyarakat di Ambulu dan bahkan Kecamatan-Kecamatan di sekitarnya. Sehingga tidak heran jika masyarakat di Ambulu jarang berbelanja ke Jember, sebab segala macam kebutuhan di pasar ambulu sudah tersedia.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Karena disini peneliti menggunakan *Purposive*, maka peneliti akan menetapkan sampel yang akan dimintai keterangan dengan cara memilih sampel diantara para pelaku ekonomi yang setiap hari terlibat aktif dalam aktifitas jual beli di Pasar Ambulu. Kemudian peneliti menentukan satu informan kunci untuk digali sumber informasinya. Informan kunci yang dimaksud peneliti disini adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Ketua Ikatan Pedagang Pasar Ambulu (IPPMA) Bapak Suryanto yang menjadi informan kunci.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan yang merupakan masyarakat yang melakukan aktifitas jual beli di Pasar Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Adapun kriteria informan yang akan dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Dinas pasar

Pada subjek yang pertama peneliti langsung menuju dinas pasar. Disini peneliti memberikan surat izin penelitian sekaligus meminta data tentang gambaran umum secara objektif di Pasar Ambulu. Selain itu, peneliti juga menanyakan tentang pemberdayaan yang telah dilakukan ataupun yang sedang diusahakan oleh dinas Pasar Ambulu. Dan dalam hal ini peneliti memilih Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP) Bapak Sugung Puryanto sebagai informan yang akan dimintai keterangan.

b. Pedagang

Pada subjek yang kedua peneliti langsung mencari informan kunci, yang menurut peneliti informan kunci tersebut mampu memberikan keterangan perihal penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun informan kunci tersebut adalah pelaku pedagang pakaian yang bernama Bapak Suryanto. Alasan mengapa disini peneliti memilih Pak Suryanto sebagai informan kunci adalah karena Pak Suryanto adalah orang yang setiap hari terlibat langsung dalam aktifitas jual beli di Pasaar Ambulu. Bahkan Pak Surynto sudah lama berdagang di Pasar Ambulu, yang menurut beliau sudah sekitaran 20 tahun lebih berjualan di Pasar Ambulu. Selain itu, Pak Suryanato juga berkedudukan sebagai ketua Ikatan Pedagang Pasar Malam Ambulu (IPPMA). Selain berjualan di Pasar Ambulu Pak Suryanto juga bertempat tinggal di dekat Pasar Ambulu, yakni Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Artinya Pak Suryanto tentu sudah tau persis karakteristik Pasar Ambulu secara keseluruhan.

Selain Pak Suryanto, peneliti menambahkan dua informan lain sebagai pembandingan. Informan tersebut adalah Ibu Mutmainnah sebagai pedagang sayur, yang beralamatkan di Desa Karang Anyar Ambulu. Dan Bapak H. Amril sebagai pedagang konveksi yang beralamatkan Krajan Ambulu.

c. Konsumen

Pada subjek yang ketiga peneliti disini mencari informan tambahan, yakni mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam penjualan di Pasar Ambulu, tetapi akan memberikan gambaran dari sudut pandang yang berbeda untuk memberikan informasi tambahan tentang data yang mengenai Pasar Ambulu. Selain itu, dengan adanya informan dari konsumen, proses triangulasi sumber dapat terpenuhi. Adapun informan tambahan adalah konsumen yang sering melakukan jual beli di Pasar Ambulu dan bekerja di MI Miftahul Ulum 29 Kauman Ambulu, informan tersebut adalah Bapak Imam Syafi'i. Alasan memilih informan tersebut adalah karena beliau sering belanja di Pasar Ambulu. Selain itu, karena beliau bekerja di dekat Pasar Ambulu diharapkan informasi tentang Pasar Ambulu bisa mengikuti perkembangan. Disini peneliti juga menambahkan dua informan tambahan, yaitu Ibu Umi Hanik dari Sumberan Ambulu. Dan Ibu Liul Isnaifah dari Sidodadi Tempurejo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian pada Pasar Ambulu ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan jenis observasi partisipasi pasif. Maksud dari partisipasi pasif adalah peneliti datang ke Pasar Ambulu untuk melihat secara langsung aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Pasar Ambulu, akan tetapi peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Peneliti melakukan pengamatan dengan teknik observasi langsung, yaitu peneliti akan mengamati atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat) disini tempat dimana interaksi sosial sedang berlangsung adalah Pasar Ambulu, *actor* (pelaku) yaitu para penjual dan pembeli yang berada di Pasar Ambulu, dan *activities* (aktivitas) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli di Pasar Ambulu.⁵¹

Hasil pengamatan yang terdiri dari tiga komponen tersebut, merupakan sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati implementasi nilai-nilai ekonomi pancasila di Pasar Ambulu.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 110.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Disini peneliti akan mewawancarai beberapa orang sebagaimana telah tertulis dalam subjek penelitian diatas, yakni pedagang sayur, pedagang pakaian, konsumen, dinas pasar.

Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Sehingga peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa diketahui melalui observasi.⁵² Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan mencari tentang data mengenai tehnik implementasi nilai-nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu dan mengenai pemberdayaan yang di terapkan di Pasar Ambulu.

Kemudian dalam teknis lapangan, berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara. Diantaranya:

- 1) Menentukan pertanyaan yang akan dijawab dalam wawancara tersebut. Pertanyaan ini bersifat terbuka, umum, dan bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada Pasar Ambulu.
- 2) Mengidentifikasi mereka yang akan diwawancarai, yang kiranya dapat menjawab dengan baik beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 114.

- 3) Menentukan tipe wawancara yang praktis dan dapat menghasilkan informasi yang paling berguna untuk menjawab pertanyaan peneliti.
- 4) Menggunakan prosedur perekaman yang memadai ketika melaksanakan wawancara.
- 5) Merancang dan menggunakan protokol wawancara, atau panduan wawancara, serta formulir yang digunakan untuk menyiapkan pertanyaan dan jawaban yang akan disampaikan oleh informan.
- 6) Menyempurnakan lebih lanjut pertanyaan wawancara dan prosedur melalui *pilot testing*.
- 7) Menentukan Pasar Ambulu sebagai lokasi wawancara.
- 8) Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan dari informan untuk berpartisipasi dalam studi tersebut.
- 9) Selama wawancara, peneliti menggunakan prosedur dan etika yang baik.⁵³

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti disini adalah dalam bentuk data tulisan dan data gambar. Dokumentasi ini dilakukan agar hasil penelitian dari observasi atau wawancara lebih kredibel jika didukung dengan dokumen-dokumen yang mendukung.⁵⁴ Sehingga hasil penelitian ini akan lebih dipercaya kebenarannya apabila didukung oleh adanya dokumentasi.

⁵³ Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & desain Riset*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 227.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 124.

E. Analisis Data

Setelah pengelolaan data selesai maka proses selanjutnya adalah menganalisis data untuk mendapatkan sebuah gambaran yang utuh terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵⁵ Dengan mempertimbangkan jenis penelitian yang dilakukan, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif yang dilakukan peneliti disini yaitu dengan cara mengamati kondisi objektif Pasar Ambulu dan kemudian menjelaskan serta mendeskripsikan terhadap hasil pengamatannya tersebut. Penjelasan ini dinarasikan dalam sebuah tulisan dengan secara hati-hati dan cermat sehingga mendapatkan tulisan yang akurat dan tepat sesuai hasil pengamatan.

Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction* dan *display*, *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari Pasar Ambulu jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka semakin lama peneliti ke Pasar Ambulu, maka jumlah data akan semakin banyak,

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 131.

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam reduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai⁵⁶. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁷

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 338.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 249.

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, yakni dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁸

F. Keabsahan Data

Bagian ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di Pasar Ambulu. Agar peneliti bisa mendapatkan temuan yang absah, maka peneliti disini akan menguji kredibilitasnya dengan cara:

- a. Memperpanjang pengamatan, dengan cara peneliti kembali lagi ke Pasar Ambulu untuk melakukan pengamatan secara mendalam.
- b. Meningkatkan ketekunan, berarti peneliti melakukan pengamatan di Pasar Ambulu secara lebih cermat dan berkesinambungan.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 252.

- c. Triangulasi, disini peneliti akan menguji kredibilitas data dengan tiga macam triangulasi, yakni:
- i. Triangulasi sumber, dengan mengecek kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap, pedagang baju, konsumen, dan dinas pasar.
 - ii. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari Pasar Ambulu dengan cara tiga teknik yang berbeda, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.
 - iii. Triangulasi waktu, disini peneliti akan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada tiga waktu yang berbeda, yakni pagi, siang, dan malam.
- d. Analisis kasus negatif, disini peneliti akan menganalisis kembali jika nanti terdapat data yang tidak sesuai dengan hasil penelitian pada Pasar Ambulu.
- e. Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud oleh peneliti disini adalah peneliti menggunakan bahan pendukung dalam bentuk alat perekam suara dan kamera handpone pada saat peneliti memperoleh data yang ditemukan di Pasar Ambulu.
- f. Mengadakan *member check*, yakni peneliti mengecek data kepada pemberi data, untuk mengetahui data yang diperoleh sudah valid atau belum.⁵⁹

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 185.

G. Tahapan–tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan ialah peneliti terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatunya sebelum peneliti melanjutkan ke tahap pelaksanaan. Peneliti juga terlebih dahulu mencari gambaran permasalahan dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan Ekonomi Pancasila sebelum terjun ke Pasar Ambulu.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti datang ke Pasar Ambulu untuk melihat, memantau, dan meninjau lokasi penelitian. Kemudian, peneliti mulai mencari serta mengumpulkan data-data yang ada di Pasar Ambulu dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut kemudian akan segera diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung atau selama peneliti berada di Pasar Ambulu. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapangan dengan teori yang digunakan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Ambulu

Pasar Ambulu adalah pasar tradisional yang pusat perdagangannya bertempat di alun alun kecamatan Ambulu. Pasar ini baru berdiri sekitar tahun 1978 an, yakni semenjak Stasiun Kereta Api di Ambulu tidak difungsikan lagi.⁶⁰ Dulunya Stasiun Ambulu adalah jalur kereta api nonaktif jurusan stasiun Balung. Stasiun tersebut termasuk dalam wilayah asset IX Jember dengan panjang lintas kurang lebih 13,801 km serta lebar sepur 600 mm.

Jalur stasiun jurusan Ambulu-Balung dibuka untuk umum dan awal beroperasinya pada tanggal 3 Mei 1913. Menurut Lekkerkerker (1938) dalam bukunya yang berjudul *Land-en-Volk van Java* menyebutkan bahwa jalur kereta api lintas selatan jurusan Lumajang-Jember ini aslinya adalah jalur trem dengan lebar sepur 600 mm yang diprakarsai oleh Staatsspoorwegen. Hingga kemudian jalur ini tutup pada tahun 1945, tetapi sempat beroperasi lagi hingga tahun 1972 an, hal ini diperkuat dengan adanya jalur rel kereta api dengan sepur 600 mm tertancap dibangun utama Stasiun Balung.⁶¹ Setelah stasiun Ambulu tidak beroperasi lagi, kemudian masyarakat sekitaran Ambulu menggunakan

⁶⁰

https://dinaspasar.jemberkab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=91&catid=18

⁶¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/jalur_kereta_api_Balung_ambulu

tempat tersebut sebagai tempat berdagang atau jual beli dengan berbagai macam jualan, hingga kemudian tempat jualan tersebut dijadikan sebagai pasar tradisional Ambulu sekaligus menjadi ikon daerah di kecamatan Ambulu.

Namun demikian, kendatipun tempat tersebut sudah seluruhnya digunakan sebagai pasar, tetapi sertifikasi lahan di Pasar Ambulu belum seluruhnya milik Pasar Ambulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pasar Ambulu, lahan yang dimiliki atau yang dinyatakan sah milik pasar Ambulu adalah empat puluh persen dari keseluruhan luas pasar Ambulu, sedangkan enam puluh persen sisanya masih berstatus milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Hingga kini Dinas Pasar Ambulu Masih berusaha mengajukan alih status lahan, agar seluruh lahan Pasar Ambulu bersertifikat milik Pasar Ambulu itu sendiri.⁶²

b. Letak Geografis

Pasar tradisional Ambulu adalah pasar yang bertempat di kecamatan Ambulu dengan titik kordinat $8^{\circ} 20'44.9''S$ $113^{\circ} 36'22.1''E$, lebih tepatnya persis di sebelah selatan alun-alun kecamatan Ambulu, kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ambulu adalah kecamatan yang secara geografis bertempat Jember wilayah bagian selatan, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan Pantai yang terkenal yaitu Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma. Luas Kecamatan Ambulu adalah 104,56 kilometer persegi dan memiliki ketinggian rata-rata

⁶² Sugeng Puryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

35 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Ambulu memiliki jumlah penduduk sekitar 109.494 jiwa dengan tingkat kepadatan 1076 jiwa perkilometer persegi. Masyarakat di Kecamatan ini mayoritas beretnis Jawa, sehingga pergaulan dalam masyarakat menggunakan Jawa dalam kesehariannya.⁶³ Adapun Kecamatan Ambulu berada di wilayah administrasi sebagai berikut.

- a. Berada di selatan Kecamatan Jenggawah.
- b. Berada di timur Kecamatan Wuluhan.
- c. Berada di barat Kecamatan Tempurejo.
- d. Sebelah selatan terdapat pantai yang bersebrangan langsung dengan Samudera Hindia.

c. Visi dan Misi Pasar Ambulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dinas Pasar Ambulu dapat digambarkan bahwa visi-misi Pasar Ambulu adalah:

Visi: “Terciptanya Pasar Ambulu Sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Sumber Pendapatan Asli Daerah.”

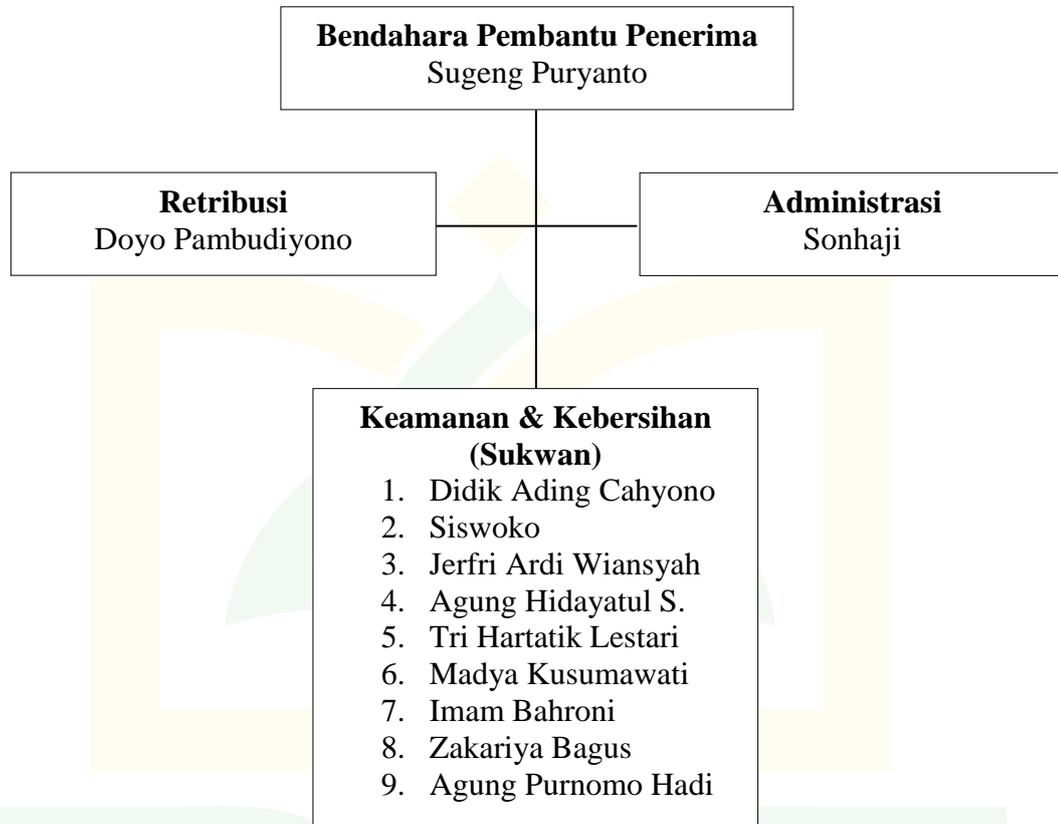
Misi:

1. Menciptakan Pasar yang bersih, indah dan nyaman, serta diakui oleh masyarakat khususnya pedagang dan pengguna Pasar.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat pengguna Pasar.
3. Menciptakan Pasar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat.
4. Menertibkan Pedagang, Administrasi dan Pungutan Retribusi serta sistem pelaporan yang akurat.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang ada serta meningkatkan pengawasan.⁶⁴

⁶³https://id.m.wikipedia.org/wiki/ambulu,_Jember

⁶⁴ Sugeng Puryanto, Wawancara, Jember, 18 November 2019.

d. Struktur Pasar Ambulu



Berikut mengenai penjelasan dari bagian-bagian dari struktur Pasar Ambulu diatas:

1. Bendahara Pembantu Penerima yakni memiliki tugas menerima uang Retribusi untuk di kirim ke Kas Daerah (Kasda) melalui Bank Jatim setiap harinya.
2. Retribusi bertugas mengambil setoran iuran uang retribusi dari pedagang setiap harinya.
3. Administrasi bertugas Membuat laporan retribusi setiap satu minggu sekali.

4. Keamanan dan Kebersihan Bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan Pasar dan Kebersihan Pasar.⁶⁵

e. Data Pedagang Pasar Ambulu

1. Daftar pedagang yang berjualan menggunakan los (kios)

Tabel 1.2
Tabel Jenis Dagangan dan Jumlah

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Warung	23
2	Sepatu	3
3	Konfeksi	113
4	Emas	23
5	Pecah Belah	6
6	Minyak Wangi	2
7	Jamu	3
8	Topi	3
9	Kaset	3
10	Kacamata	3
11	Konter	6
12	Arloji	4
13	Pracangan	55
14	Kue	2
15	Palen	1
16	Apotik	1
17	Penjahit	4
18	Sandal	4
19	Kricikan	5
20	Servis Jam	1
21	Rampan	3
22	Warung Kopi	2
23	Plastik	4

⁶⁵ Sugeng Puryanto, Wawancara, Jember, 19 November 2019.

24	Jagal	7
25	Kain	8
26	Bengkel	1
27	Selep	1
28	Grabah	1
29	Sepatu Sandal	1
30	Aksesoris	2
31	Soto	1
32	Ayam Potong	6
33	Ikan	2
34	Tempe	3
35	Dawet	2
36	Bakso	1
37	Tas	8
38	Warung Nasi	2
39	Kerupuk	1
40	Telor	1
41	Bubur	1
42	Sepeda	1
43	Pisang	1
44	Camilan	2
45	Mamiri	1
46	Buah	9
47	Polo Pendem	1
48	Camba	4
49	Kacang	1
50	Tahu	2
51	Sayur	9
52	Ikan Laut	1
53	Lombok	1
54	Tutup	77
Total		433

2. Daftar pedagang Pasar Tumpah⁶⁶

Tabel 1.2
Tabel Jenis Dagangan dan Jumlah di Pasar Tumpah

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Kelapa	21
2	Sayur	84
3	Ikan Pindang	1
4	Bawang	10
5	Tempe	7
6	Ikan laut	14
7	Ayam potong	4
8	Jagung	10
9	Sayur tewel	1
10	Lombok/cabe	18
11	Telur	2
12	Cecek	3
13	Kecambah	4
14	Ketela	4
15	Tomat	1
16	Nasi	2
17	Semangka	4
18	Tahu	6
19	Selep kelapa	1
20	Kerupuk	3
21	Kresek	1
22	Buah	1
23	Ikan lele	1
24	Kue	4
25	Timun	1
26	Lontong	1
27	Tape	1
Total		211

⁶⁶ Pasar yang berjualan dipagi hari mulai jam 02.00 wib sampai jam 09.00 wib dan bertempat di halaman pasar tanpa menggunakan kios.

f. Latar Belakang Pedagang Pasar Ambulu

Dari segi pendidikan, Pedagang di Pasar Ambulu ini memiliki latar belakang pendidikan yang bermacam-macam mulai dari SD, SMP, SMA, S1 dan ada tidak lulus sekolah SD, bahkan juga ada yang tidak sekolah sama sekali. Sebab, untuk menjadi pedagang di Pasar Ambulu tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan ataupun *life skill* yang khusus. Artinya, di Pasar Ambulu tidak ada peraturan yang ketat atau mengikat karena siapapun boleh keluar masuk ke Pasar Ambulu.⁶⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Di dalam sebuah penelitian diharapkan akan memperoleh data dan hasil temuan sesuai dengan yang diinginkan, oleh karena itu peneliti berusaha menerapkan hasil temuan yang ada di lapangan dengan menggunakan berbagai cara, baik itu dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, setelah data diperoleh kemudian akan direduksi dan dikumpulkan untuk dianalisis untuk mendapat hasil penelitian yang diinginkan, data yang diperoleh akan disajikan dan di analisis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini, adapun fokus penelitian serta penyajian data dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁶⁷ Sugeng Puryanto, Wawancara, Jember, 18 November 2019.

a. Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu

Dimulai dari nilai etik dan moral dalam Pancasila masuk dalam sila *Ketuhanan yang Maha Esa*, di pasar ambulu tidak pernah ada gejolak yang terjadi. Bahkan, untuk menjaga ketertiban dan keamanan pasar, di bulan puasa yakni disaat pasar berada dipuncak keramaian karena dipadati konsumen polisi sering patroli tiap seminggu sekali. Hal ini telah disampaikan oleh Pak Suryanto salah seorang pedagang pakaian di Pasar Ambulu.

“Di Ambulu dari segi Etika termasuk yang paling baik karena tidak pernah ada gejolak yang terjadi, sedangkan di Pasarnya biasa-biasa saja, standar, aman-aman saja dan gejolak-gejolak juga tidak ada. Apalagi kriminal, seperti pencopetan dan lain-lain tidak pernah ada sama sekali, dikarenakan di ambulu ada polisi yang patroli setiap hari selasa dibulan Puasa (Rhamadhan), hanya setiap bulan puasa lo kalau bukan bulan puasa ya enggak. Karena di bulan puasa, pasar Ambulu sedang ramai-ramainya. Sedangkan dibulan lain selain puasa, pembelinya biasa-biasa saja dan tidak begitu ramai, hal ini dikarenakan di Ambulu sini bukan daerah industri tetapi mayoritas mata pencaharian di daerah Jember selatan (Ambulu dan sekitarnya) adalah petani, yang panenannya hanya tiga bulan sekali.”⁶⁸

Sedangkan menurut Pak Imam Syafi’i memandang Pasar Ambulu selalu guyub rukun.

“Di Pasar Ambulu sini para pedagangnya selalu guyub, rukun kompak, dan di Pasar Ambulu sini tidak pernah ada tindak pelaku kriminal ataupun kejahatan. Kemaren sekitar dua minggu yang lalu di Ambulu memang sempat ada kejadian pencurian sepeda motor, tetapi tidak di Pasar Ambulu sini tetapi di Pasar Hewan desa Tegalsari”.⁶⁹

Sedangkan menurut Pak H. Amril memandang Pasar Ambulu selalu tertib.

⁶⁸ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

⁶⁹ Imam Syafi’i, Wawancara, Jember, 29 November 2019.

“Di Pasar Ambulu dari segi Etika sangatlah tertib, dan bahkan ketika masjid berkumandang adzan para pedagang menyempatkan untuk beribadah terlebih dahulu, itu menurut saya jika dilihat segi Sila Ketuhanan”.⁷⁰

Sedangkan menurut Ibu Mutmainnah memandang Pasar Ambulu

biasah-biasah aja selayaknya pasar pada umumnya.

“Ya biasah-biasah aja mas, kayak pasar umumnya”.⁷¹

Sedangkan menurut Ibu Umi Hanik di Pasar Ambulu memiliki

pedagangnya sopan.

“Alhamdulillah, kalau dari etika disini pedagang yang menawarkan dagangannya termasuk sopan”.⁷²

Kemudian, untuk nilai-nilai kemanusiaan (*Humanisme*) atau

yang di dalam Pancasila berbunyi *Kemanusiaan yang adil dan beradab*

di pasar Ambulu adalah:

“Di Pasar Ambulu ini nilai sosialnya tinggi seperti pembangunan masjid Ambulu⁷³ saja, atau semisal ada kegiatan lain di masjid, dalam mencari dana itu perminggunya bisa sampai lima belas juta. Untuk pasar pagi biasanya bisa sampai satu juta lebih untuk sumbangan kegiatan sosial. Tetapi jika untuk di gunakan untuk pembangunan masjid biasanya di umumkan lewat corongan (pengeras suara yang ada di masjid) terlebih dahulu. Nah kalau ada pengumuman seperti itu biasanya perminggunya bisa sampai empat belas sampai lima belas juta perminggunya.”⁷⁴

Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama pedagang di

Pasar Ambulu dalam bentuk tolong menolong adalah sebagai berikut:

“Disini semisal ada konsumen cari apa tetapi saya tidak punya, maka saya arahkan ke pedagang lain yang menjual. Terkadang orang jualan tetapi barang yang dicarinya tidak ada hanya bilang

⁷⁰ H. Amril, Wawancara, Jember, 31 Januari 2020.

⁷¹ Mutmainnah, Wawancara, Jember, 31 Januari 2020.

⁷² Umi Hanik, Wawancara, Jember, 01 Februari 2020.

⁷³ Masjid Jami' Baitul Amien Ambulu. Lokasi masjid tepat berada di barat pasar Ambulu. Di saat peneliti sedang melakukan wawancara, yakni pada tanggal 7 November 2019 di masjid tersebut sedang ada renofasi bangunan.

⁷⁴ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

“tidak ada mbak” tetapi kalau disini “silahkan kesitu lo mbak” karena disini solidaritasnya tinggi.”⁷⁵

Sedangkan menurut Bapak Imam Syafi’i di Pasar Ambulu memiliki kepedulian antar sesama.

“Selain guyub rukun di Pasar Ambulu para pedagangnya suka tolong menolong antar sesama dan memiliki kepedulian antar sesama.”⁷⁶

Sedangkan menurut Ibu Umi Hanik di Pasar Ambulu memiliki pelayanan yang maksimal.

“Alhamdulillah, disini pelayannya maksimal, meskipun terkadang saya sedikit risih karena ketika lewat terlalu banyak pedagang yang menawarkan dagangannya”.⁷⁷

Sedangkan menurut Ibu Liul Isnaifah di Pasar Ambulu memiliki pelayanan yang maksimal melalui usaha pedagang memenuhi kebutuhan konsumen.

“Saya senang belanja di Pasar Ambulu karena segala segala keperluan yang saya butuhkan semuanya ada. Jika kebetulan barangnya tidak ada pedagang mengusahakan mencarikan barang yang kita inginkan ke pedagang sekitarnya”.⁷⁸

Selanjutnya, untuk nilai-nilai persatuan atau yang didalam Pancasila berbunyi *Persatuan Indonesia* didalam aktifitas perekonomian di pasar Ambulu adalah sebagai berikut:

“Dalam kegiatan perekonomian pasar malam ada paguyuban-paguyubannya sendiri, konveksi-konveksi, makanan-makanan dan ada ketuanya masing-masing.”⁷⁹

Maksud dari Pak Suryanto tersebut diatas adalah dipasar Ambulu yang melakukan aktifitas jual beli di malam hari, terdapat semacam

⁷⁵ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

⁷⁶ Imam Syafi’i, Wawancara, Jember, 29 November 2019.

⁷⁷ Umi Hanik, Wawancara, Jember, 01 Februari 2020.

⁷⁸ Liul Isnaifah, Wawancara, Jember, 01 Februari 2020.

⁷⁹ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

paguyuban atau organisasi yang mengikatnya, adapun organisasi tersebut adalah IPPMA singkatan dari Ikatan Pedagang Pasar Malam Ambulu.

Sedangkan menurut Bapak Imam syafi'i menilai persatuan di Pasar Ambulu dari kekompakannya.

“Kalau menurut saya nilai persatuan di Pasar Ambulu sini dapat dinilai dari kekompakannya.”⁸⁰

Sedangkan menurut Ibu Mutmainnah menilai persatuan di Pasar Ambulu dari segi nilai kekeluargaannya.

“Di Pasar Ambulu sini menganggap semuanya saudara”⁸¹

Sedangkan menurut H. Amril menilai persatuan di Pasar Ambulu dari segi nilai kekompakannya.

“Kalau menurut saya di sini orangnya kompak-kompak semisal ada iuran untuk pembangunan masjid semuanya kompak, mau iuran semua.”⁸²

Kemudian, kandungan serta nilai-nilai dari sila pancasila yang keempat yang berbunyi *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat, Kebijaksanaan dalam Permusyratan, Perwakilan* dalam aktifitas perekonomian dipasar Ambulu adalah sebagai berikut:

“Di pasar sini masih ada yang dominan los (kios) ini ada kelas satu kelas dua kelas tiga. Cuman kelasnya saya tidak faham.”⁸³

Selain itu, dalam penentuan harga, pedagang Pasar ambulu memberikan sistem tawar menawar kepada konsumen.

“Masalah harga disini standar lah, dan harganya tergantung hasil tawar menawar. Tidak seperti di pasar Modern yang harganya sudah pas (tidak bisa ditawar).”⁸⁴

⁸⁰ Imam Syafi'i, Wawancara, Jember, 29 November 2019.

⁸¹ Mutmainnah, Wawancara, Jember, 31 Januari 2020.

⁸² H. Amril, Wawancara, Jember, 31 Januari 2020.

⁸³ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

⁸⁴ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

Sedangkan menurut Bapak Imam Syafi'i sila ke empat bentuknya adalah bentuk tawar menawar dan interaksinya.

“Kalau di pasar sini menurut saya dari tawar menawar dan interaksinya.”⁸⁵

Kemudian untuk Sila Pancasila kelima, yang berbunyi *Keadilan*

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di Pasar Ambulu adalah:

“Disini dari segi kesejahteraan sama-sama tidak ada ketimpangan, maksudnya ketimpangan yang terlalu jauh tidak ada. Jiwa pedagang itu *Penggawean kena ditiru rejeki opo jere seng duwur*. Artinya, orang kerja apa saja asal ada modal kan bisa meniru, ini bisa laris aku tak meniru tetapi kenyataannya rejekinya kan tidak sama.”⁸⁶

Begitupun menurut Bapak Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa:

“Kalau ini saya kurang faham ya, tetapi setuju saya antar sesama pedagang saling bantu, jadi soal kemakmuran saya kira rata semua.”⁸⁷

Begitupun menurut Bapak H. Amril yang mengatakan bahwa dengan berdagang di Pasar Ambulu beliau telah mampu memenuhi semua kebutuhan:

“Saya mampu menyekolahkan anak, ada yang masih mondok dan ada yang sudah kuliah. Alhamdulillah semua kebutuhan cukup lah”.⁸⁸

b. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Perekonomian di Pasar Ambulu

Pemberdayaan Perekonomian di Pasar Ambulu dilakukan oleh para pedagang itu sendiri, sebab peran dari Dinas Pasar ataupun dari pemerintah daerah masih dianggap tidak ada peran yang cukup berarti, hal juga jelaskan oleh Pak Suryanto.

⁸⁵ Imam Syafi'i, Wawancara, Jember, 29 November 2019.

⁸⁶ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

⁸⁷ Imam Syafi'i, Wawancara, Jember, 29 November 2019.

⁸⁸ H. Amril, Wawancara, Jember, 31 Januari 2020.

“Pemberdayaan Pasar dilakukan oleh pedagang itu sendiri, dulu ini tahun berapa saya lupa, saat pasar ini dibangun langsung berurusan dengan kotraktor, setelah jadi pedagang mambayar uang ganti bangunan bukan hak milik, kan pasar tidak ada hak milik. Waktu dibangun pertama kali lalu siapa yang siap menempati harganya sekian-sekian. Artinya tidak berhubungan dengan dinas, tetapi langsung berhubungan dengan kotraktor.”⁸⁹
Dinas Pasar hanya bertugas mengatur ketertiban pasar, agar

aktifitas jual beli bisa berjalan dengan kondusif. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Suryanto.

“Dinas pasar hanya bertugas sebagai pengaturan saja, agar pembeli enak dan penjual juga enak, terkadang kan ada pedagang yang berjualan terlalu maju, disitu dinaslah yang mentertibkan. Selain itu, Semisal ada pedagang ingin melakukan renovasi ya melakukan renovasi sendiri tetapi atas sepengetahuan Dinas Pasar.”⁹⁰

Namun berdasarkan wawancara dari pihak dinas pasar, menyatakan bahwa Pasar Ambulu masih berusaha menyelesaikan legalisasi sertifikat Pasar terlebih dahulu sebelum melakukan renovasi pasar.

“Pasar sini sekarang masih fokus menyelesaikan sertifikat Pasar, karena pasar sini masih 40 persen milik pasar dan 60 persen milik PJKA. Setelah itu selesai mungkin satu atau dua tahun kedepan baru mengusahakan pengajuan renovasi bangunan pasar.”⁹¹

Begitupun menurut Bapak Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa:

“Kalau pemberdayaan pasar saya rasa dari segi penertiban dan pengawasan yang dilakukan Dinas Pasar, agar aktifitas jual beli bisa lancar.”⁹²

⁸⁹ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

⁹⁰ Suryanto, Wawancara, Jember, 07 November 2019.

⁹¹ Sugeng Puryanto, Wawancara, Jember, 18 November 2019.

⁹² Imam Syafi’i, Wawancara, Jember, 29 November 2019.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila dalam Pemberdayaan Perekonomian Pasar Tradisional di Ambulu, perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

a. Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu

Berdasarkan analisis data di atas, diperoleh pemahaman bahwa, nilai-nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu sudah terimplementasikan. Dimulai dari sila pertama *Ketuhanan yang Maha Esa*. Di Pasar Ambulu nilai etika dan moral sangatlah dikedepankan. Dibuktikan dengan tidak adanya gejolak-gejolak dalam bentuk kriminalitas ataupun premanisme atau dalam bentuk apapun yang menyebabkan terjadinya keresahan. Bahkan, untuk lebih menjaga keamanan dan ketertiban, pada saat Pasar Ambulu berada di puncak keramaian yakni pada saat bulan puasa, polisi datang berpatroli di Pasar Ambulu agar kemungkinan terjadinya kriminalitas dapat dihindarkan. Sebab, Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialis, karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral, dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian

Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etik.⁹³ Selain itu, hal ini senada dengan pernyataan Mubyarto yang mengatakan bahwasanya ekonomi haruslah mendasarkan diri pada moral, karena Tuhanlah yang menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini.⁹⁴ Bahkan, menurut Adam Smith dalam tulisannya yang pertama (*The Theory Of Moral Sentiment*, terbit pada 1759, menjelaskan bahwa ekonomi tidak terlepas dari faktor etika dan moral karena manusia adalah *homo socius*, bukan hanya sebatas *homo economicus*.⁹⁵

Selanjutnya mengenai Sila Pancasila yang kedua *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Di Pasar Ambulu, nilai kemanusiaan (*humanisme*) dan nilai sosialnya tinggi. Setiap ada kegiatan-kegiatan sosial para pedagang di Pasar Ambulu sangatlah antusias dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Semisal contoh, jika masjid sedang membutuhkan sumbangan untuk renovasi bangunan, para pedagang selalu memberikan donasinya untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Pun antar sesama pedagang, nilai-nilai sosial juga sangat dikedepankan, hal ini dibuktikan dengan aktifitas mereka yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong serta tolong menolong antar sesama pedagang. Seperti contoh jika ada pedagang kehabisan stok atau bahkan tidak punya stok barang dagangan yang sedang dicari pembeli, maka pembeli langsung diarahkan ke penjual yang memiliki barang yang sedang di cari. Artinya, hal ini sesuai dengan

⁹³ Hastangka, "Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto", *Jurnal Filsafat*, 1 (April, 2012), 40.

⁹⁴ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

⁹⁵ A. Sofyan Alnashr, "Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam" *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 205.

dasar moral Ekonomi Pancasila yang mengedepankan gotong royong, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Bahkan Mohammad Hatta juga menegaskan bahwa di Indonesia kemakmuran Masyarakat atau kemakmuran bersama lebih utama dari pada kemakmuran perorangan atau individu.⁹⁶ Selain itu, Mubyarto juga menjelaskan bahwasanya dalam mengimplementasikan *kemanusiaan yang adil dan beradab* maka ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil dan beradab, menganggap sama semua manusia, satu dengan yang lain tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.⁹⁷

Selanjutnya, mengenai Sila Pancasila yang ketiga *Persatuan Indonesia* didalam Pasar Ambulu sudah menerapkan nilai-nilai persatuan terbukti dengan kekompakan dan juga adanya organisasi yang mempersatukan para pedagang organisasi tersebut adalah Ikatan Pedagang Pasar Malam Ambulu atau yang disingkat IPPMA. Merupakan bentuk persatuan dari pedagang yang mengadakan nasibnya dipasar Ambulu. Artinya, nilai kekeluargaan masih terjalin kuat antar sesama pedagang. Sedangkan Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah menolak penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, dan individualisme.⁹⁸

⁹⁶ Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018),20.

⁹⁷ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

⁹⁸ A. Sofyan Alnashr, "Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam" *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 205.

Selanjutnya adalah Sila Pancasila keempat *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan* didalam Pasar Ambulu juga sudah terimplementasikan. Bentuknya, pemberian fasilitas dalam bentuk kios yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang itu sendiri. Selain itu, dalam penentuan harga, dipasar Ambulu menerapkan sistem tawar menawar antara penjual dengan pembeli, hingga terjadi interaksi untuk menyepakati harga yang ditawarkan oleh para penjual. Tidak kemudian penjual serta merta memberikan harga tetap kepada pembeli. Artinya demokrasi ekonomi sebagaimana terkandung dalam Pancasila sila keempat sudah terimplementasikan dalam bentuk pemberian ruang kepada konsumen untuk menawar barang yang ingin dibeli. Selain itu, terjadinya interaksi antara pedagang dan pembeli adalah bentuk Ekonomi Kerakyatan, sebab hal ini tidak akan terjadi pada pasar modern. Sedangkan yang dimaksud prinsip demokrasi ekonomi adalah bahwa setiap orang, meski dia itu miskin ataupun lemah, tetap harus di ikutsertakan dalam tiap pembuatan kebijakan.⁹⁹

Dan yang terakhir adalah sila kelima *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, yang merupakan ujung harapan dari semua sila. Jadi, jika lima sila tersebut kita peras secara analitis, maka sila pertama dan sila kedua menjadi dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan. Kemudian, sila ketiga dan empat adalah caranya, berupa nasionalisme dan demokratis. Lalu sila kelima adalah tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan

⁹⁹ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyorto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁰ Dan di Pasar Ambulu tingkat kesejahteraan dari para pedagang tidak ada ketimpangan. Tentu ini disebabkan prinsip gotong royong serta tolong menolong yang selalu diterapkan di Pasar Ambulu. Hal ini senada dengan ajaran agama Islam, yang menjelaskan bahwa keadilan sosial adalah tuntutan mutlak dalam ajaran Islam, baik rumusan “hendaklah kalian bertindak adil (أَتَعَدِلُوا)” maupun keharusan “menegakkan keadilan (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ),” berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci al-Quran.¹⁰¹ Artinya, sila keadilan sosial sudah terimplementasikan di Pasar Ambulu.

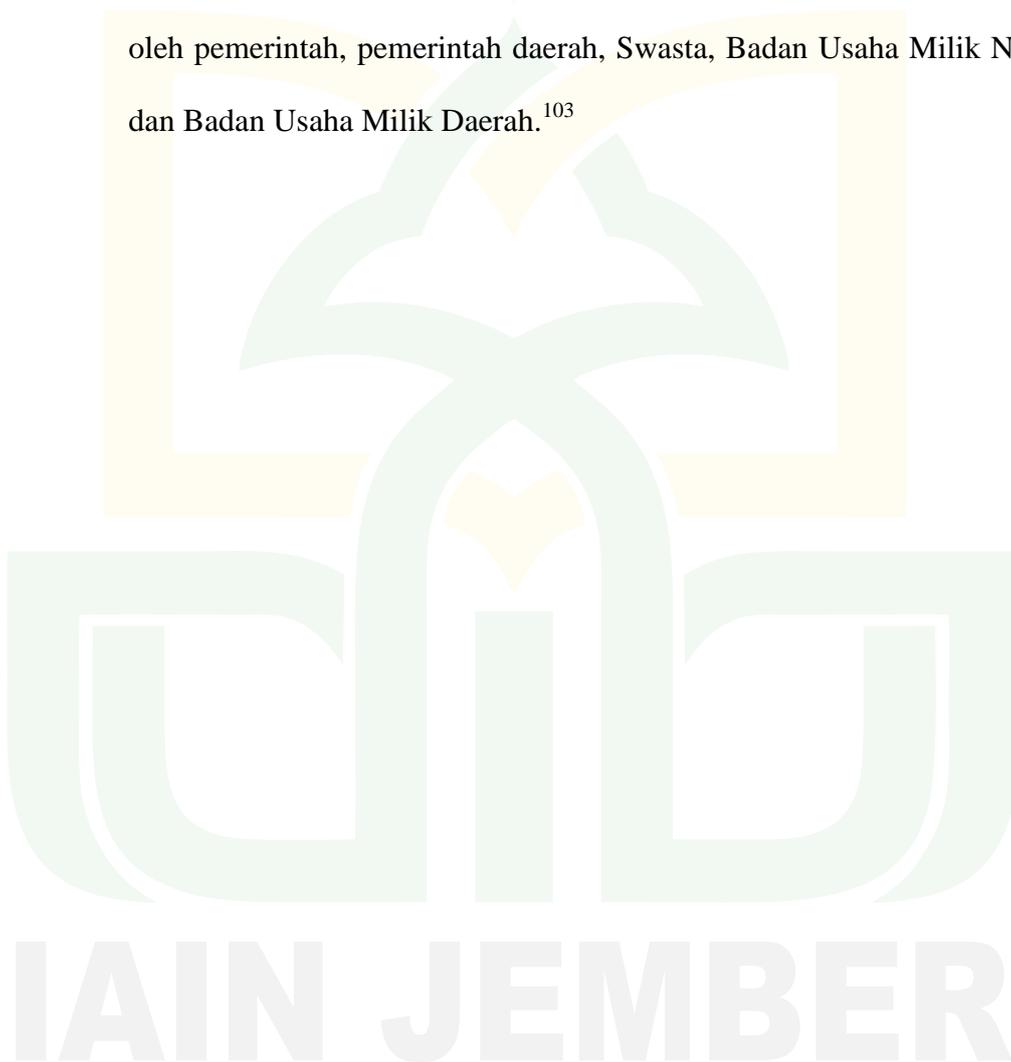
b. Bentuk-Bentuk pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu

Dipasar Ambulu, dalam memberdayakan perekonomian, justru dilakukan oleh para pedagang itu sendiri, seperti memperbaiki kios dan melariskan dagangan. Namun, bukan berarti Dinas Pasar Ambulu tidak memiliki peran sama sekali. Dinas Pasar, memiliki peran menertibkan dan mengawasi pasar, agar aktifitas jual beli di Pasar Ambulu bisa berjalan lancar. Selain itu, dipasar Ambulu dalam usaha memberdayakan perekonomian pasar, Dinas Pasar masih berusaha menyelesaikan sertifikasi lahan yang belum selesai. Sebab, lahan yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan, belum sepenuhnya milik pasar, yakni 40 persen milik pasar sedangkan 60 persen sisanya milik PJKA. Setelah proses setrifikasi sudah selesai, baru kemudian dinas Pasar mengajukan renovasi bangunan

¹⁰⁰ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyorto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

¹⁰¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam, 2006), 168.

kepada pemerintah daerah. Agar para pedagang dan pembeli dapat beraktifitas dengan nyaman di Pasar Ambulu. Hal ini dianggap penting, mengingat pasar tradisional merupakan cerminan dari kehidupan sosial didalam suatu wilayah tertentu.¹⁰² Bahkan, menurut Perpres N0. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.¹⁰³



¹⁰² Anung Pramudyo, “Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta”, *JBMA*, 2 (Maret, 2014), 82.

¹⁰³ *Ibid.*, 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu sudah terimplementasikan. Dimulai dari sila pertama di Pasar Ambulu nilai etika dan moral sangatlah dikedepankan. Dibuktikan dengan tidak adanya gejolak-gejolak kriminal dalam bentuk apapun yang menyebabkan terjadinya keresahan.

Selanjutnya Sila yang kedua. Di Pasar Ambulu, nilai kemanusiaan dan nilai sosialnya tinggi. Setiap ada kegiatan-kegiatan sosial para pedagang di Pasar Ambulu sangatlah antusias dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Selain itu, antar sesama pedagang pun demikian, hal ini dibuktikan dengan aktifitas mereka yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong serta tolong menolong antar sesama pedagang.

Selanjutnya Sila Pancasila yang ketiga. Didalam Pasar Ambulu sudah menerapkan nilai-nilai persatuan terbukti dengan kekompakan para pedagang serta adanya organisasi yang mempersatukan para pedagang organisasi tersebut adalah Ikatan Pedagang Pasar Malam Ambulu (IPPMA). Merupakan bentuk persatuan dari pedagang yang mengadakan nasibnya dipasar Ambulu.

Selanjutnya, Sila keempat didalam Pasar Ambulu juga sudah terimplementasikan. Bentuknya pemberian fasilitas dalam bentuk kios

yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang itu sendiri. Selain itu, dalam penentuan harga dipasar Ambulu menerapkan sistem tawar menawar antara pedagang dengan pembeli hingga terjadi interaksi antar keduanya, tidak kemudian penjual serta merta memberikan harga tetap kepada pembeli.

Dan yang terakhir adalah sila kelima yang merupakan ujung harapan dari semua Sila. Dan di Pasar Ambulu tingkat kesejahteraan dari para pedagang tidak ada ketimpangan. Tentu ini disebabkan prinsip gotong royong serta tolong menolong yang selalu diterapkan di Pasar Ambulu. Artinya, sila keadilan sosial sudah terimplementasikan di Pasar Ambulu.

2. Bentuk-Bentuk pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu justru dilakukan oleh para pedagang itu sendiri seperti memperbaiki kios dan usaha melariskan dagangan. Sedangkan Dinas Pasar memiliki peran menertibkan dan mengawasi pasar, agar aktifitas jual beli di pasar ambulu bisa berjalan lancar. Selain itu, Dinas Pasar masih berusaha menyelesaikan sertifikasi lahan. Setelah proses setrifikasi sudah selesai, baru kemudian dinas Pasar mengajukan renovasi bangunan kepada pemerintah daerah.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pasar

Disarankan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember khususnya Unit Pasar Ambulu untuk benar-benar memberi perhatian lebih terhadap pemberdayaan pedagang yang melakukan aktifitas penjualan di Pasar Ambulu.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Mengingat penelitian ini dirasa masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan supaya bisa dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut untuk upaya penyempurnaan penelitian ini, baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Nana. 2015 *“Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1953-1972) Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Sejarah SMA Kelas XII”* Skripsi: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Akbar, Muhammad Ali dan Ghufron, Moh. Idil. 2019. “Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam”, *Jurnal Mashrif al-Syariah*.
- Alnashr, Sofyan. 2015. “Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam.” *Jurnal Islamic Review*.
- Andini, Uly Hikmah dan Soeaidy, Mochamad Saleh dan Hayat, Ainul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Arianty, Nel. 2013. “Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional.” *Jurnal Manajemen & Bisnis*.
- Arodha, Dianidza. 2018. “Ketahanan Ekonomi Masyarakat Enclave dalam Rangkaian Sistem Kekerabatan dan Solidaritas Sosial (Studi Kasus di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi)”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Baswir, Revrison . 2015. “Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme.” *Gema Keadilan*.
- Boediono. 2015. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Creswell, Jhon W. 2015. *Penelitian Kualitatif & desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dumairi dan Nugroho, Tarli. 2014. *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
- Graha, Andi Nu. 2009. “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi”, *MODERNISASI*.
- Hastangka. 2012. “Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto.” *Jurnal Filsafat*.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional

- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Irwanto, Hartono Tasir. 2016 “*Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi*” Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Jumadin. 2015 “*Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe selatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam*” Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Masruroh, Nikmatul dan Parmono, Agung. 2018. “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowo tengah, Sumber Baru Jember Indonesia.” *Fenomena*.
- _____. 2018. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto dan Boediono. 1981. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.
- Noor, Afif. 2013. “Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern.” *Evonomica*.
- Pramudyo, Anung. 2014. “Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta.” *JBMA*.
- Rahardjo, M. Dawam. 2009. “Menuju Sistem Perekonomian Indonesia.” *LSAF*.
- _____. 2004. “Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Pancasila”, *UNISIA*.
- Risqani, Ita. 2016. “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Pantai Payangan Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Dalam Persepektif Ekonomi Islam*.” Skripsi:Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Ruslina, Elli. 2012. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- _____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno. 1964. *Tjamkan Pantja Sila! Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Sutami, Wahyu Dwi. 2012. “Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional.” *BioKultur*.
- Swasono, Sri-Edi. 2015. *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*. Yogyakarta: Universitas Sriwijaya Press.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Perss.
- Tiningsih, Kiki Aprilia. 2016. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Sewa Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.” Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Triatmojo, Muhamad Bambang dan Rengga, Aloysius. 2019. “Evaluasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Rejomulyo Di Kota Semarang”, *Journal of Public Police an Management Review*.
- Tw, Hg. Suseno. 2003. “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Ukm Dan Entrepreneurship Di Kalangan Pengusaha Kecil” *Jurnal widya manaiemen & akuntansi*.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam.
- Wardana, Faiz Rahman. 2016. “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau Dari Perspektif Ekoonomi Islam.” Skripsi: Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Yudistira. 2016. “Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa” *UNNES*.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Imron Fauzi
NIM : E20152117
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 31 Desember 2019

Saya yang Mengetahui



M. Imron

E20152117

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan perekonomian Pasar Tradisional di Ambulu.	Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu	1. Ekonomi Pancasila 2. Pemberdayaan Pasar	1. Pengertian Ekonomi Pancasila 2. Aktifitas Jual Beli 3. Perilaku Ekonomi 1. Dinas pasar Ambulu 2. Pemerintah Daerah 3. Para pelaku ekonomi	a. Sumber Primer Narasumber: 1. Dinas Pasar Ambulu 2. Pedagang Sayuran 3. Pedagang Baju 4. Konsumen Pasar Ambulu b. Sumber Sekunder: 1. Dokumentasi 2. Buku 3. Jurnal	1. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif 2. Jenis penelitian deskriptif 3. Lokasi penelitian Pasar Tradisional Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember 4. Metode pengumpulan data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi	Fokus penelitian: 1. Bagaimana Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu? 2. Bagaimana Pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu?

PEDOMAN WAWANCARA

Ekonomi Pancasila

1. Sila Ketuhanan

- Apakah didalam aktifitas jual beli di pasar ambulu ini sudah menerapkan nilai-nilai ketuhanan nilai etik dan moral antar sesama pedagang ataupun kepada konsumen ?
- Seperti Apa Bentuknya?

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- Apakah didalam aktifitas jual beli di pasar ambulu ini sudah menganggap semuanya sama (sederajat, setara) ?
- Ataukah sebaliknya dipasar ambulu ada penguasa yang kedudukannya lebih tinggi?
- Apakah di pasar ambulu ini ada nilai-nilai kemanusiaan (*Humanisme*) baik dalam bentuk tolong menolong atau dalam bentuk lainnya?

3. Sila Persatuan Indonesia

- Seperti apa bentuk-bentuk Persatuan (*Nasionalisme*) Di Pasar Ambulu?

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan Perwakilan

- Seperti apa bentuk demokrasi ekonomi di pasar ambulu?

5. Sila Keadilan Sosial

- Di dalam Pancasila Keadilan Sosial Merupakan tujuan, apakah di pasar ambulu sudah tercapai keadilan social sebagaimana yang di maksudkan dalam pancasila?

Pemberdayaan

1. Bagaimana Bentuk pemberdayaan pasar ambulu?

- Apa peran pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar Ambulu?
- Apa peran Dinas Pasar dalam memberdayakan Pasar Tradisional Ambulu?
- Apa peran pedagang dalam memberdayakan pasar Ambulu?
- Apa peran konsumen dalam memberdayakan pasar ambulu?

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jember

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 821 /In.20/7.a/PP.00.9/11 /2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Dinas Pasar Ambulu

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : M. Imron Fauzi

NIM : E20152117

Semester : IX

Prodi : Ekonomi Syari'ah

No Telp : 0852 3393 9241

Dosen Pembimbing : DARU ANONDO, SE., M.Si

NIP : 19750303 200901 1 009

Judul Penelitian : Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Pernerdayaan Perekonomian Pasar Tradisional di Ambulu

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 06 November 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

UNIT PASAR AMBULU

JL. RAYA SUYITMAN 68172

Jember, 10 Desember 2019

Nomor : 975/31/35.09.331/2019

Jumlah Lembar : 1 (Satu) Lembar

Tipe : Biasa

Judul : Surat Keterangan Penelitian

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugeng Puryanto

Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu

Instansi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UNIT PASAR AMBULU

Alamat : jl. Raya suyitman Ambulu

Surat ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Imron Fauzi

NIM : E 20152117

Program Studi : Ekonomi Syariah

Departemen : Ekonomi dan Bisnis Islam

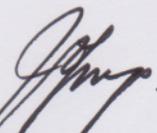
Universitas : IAIN JEMBER

Yang benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI PANCASILA DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN PASAR TRADISIONAL DI AMBULU. Sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019.

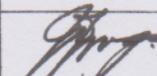
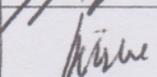
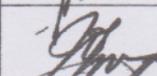
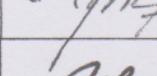
Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Jember 10 Desember 2019
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Pasar Ambulu

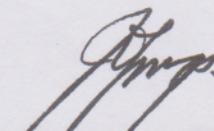

SUGENG PURYANTO
NIP. 196708222008011008

Jurnal Kegiatan Penelitian di Pasar Tradisional Ambulu

Nama : M. Imron Fauzi
NIM : E20152117
Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah
Semester : IX
Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan
Perekonomian Pasar Tradisional di Ambulu.

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	07 November 2019	Menyerahkan surat izin penelitian	
2	07 November 2019	Wawancara dengan pedagang baju	
3	18 November 2019	Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit pasar Ambulu	
4	29 November 2019	Wawancara dengan konsumen	
5	09 Desember 2019	Meminta tanda tangan dan surat selesai penelitian	
6			
7			

Jember, 09 Oktober 2019
Bendahara Penerimaan Pembantu
Pasar Ambulu


Segeng Puryanto
NIP. 19670822200801 1 008

DOKUMENTASI



Aktifitas Jual Beli Di Pasar Tradisional Ambulu



Suasana Pasar Tradisional Ambulu di Siang Hari



Suasana Pasar Tumpah (Pasar Pagi) di Ambulu



Suasana Pasar Malam di Ambulu



Foto Bersama Informan Bapak Suryanto



Foto Bersama Informan Bapak Sugeng Purwanto

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : M. Imron Fauzi
NIM : E20152117
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 13 Januari 1997
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Darussalam RT:07 RW:02 Ds. Jatimulyo
Kec. Jenggawah Kab. Jember
Telp : 0852 3393 9241
Email : ImronFauzi1301@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Jatimulyo II
2. MTs Al-Amien Ambulu
3. MA Al-Amien Ambulu

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI PANCASILA DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN PASAR TRADISIONAL DI AMBULU

M. Imron Fauzi, Daru Anondo, SE. M.Si

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember

Email: Imroenfagundies@gmail.com

Abstract: The Pancasila Economic Idea emerged as a form of the acceptance of the Pancasila ideology as the basis of the state and the philosophy of life in the nation and state. Pancasila economy must be directly related to the economy of the small people, and relies on morality that prioritizes mutual cooperation, togetherness, and kinship as contained in article 33 of the 1945 Constitution.

This research uses a qualitative approach and descriptive research type. In determining the research subject using purposive and using data collection techniques through observation, interviews and documentation.

The results of this study are; 1) Pancasila Economic Values in the Ambulu Market have already been implemented. Starting from the first precept in the Ambulu Market, ethical and moral values are highly promoted. Evidenced by the absence of any criminal turmoil that causes anxiety. The second precept in Ambulu Market is that humanity and social value are high. Every time there is a social activity, the traders at Ambulu Market are very enthusiastic in making this activity a success. In addition, among their fellow traders they also prioritize mutual cooperation values and help each other. The third Sila Pancasila in the Ambulu Market has implemented the values of unity as evidenced by the cohesiveness and the organization that unites the traders of the organization is IPPMA. The fourth precept in Ambulu Market is the provision of facilities in the form of kiosks that are adjusted to the needs of the traders themselves and in determining the price applying the bargaining system. And the last is the fifth precept which is the end of all Sila's hopes. In Pasar Ambulu there is no imbalance in the level of welfare of traders. That is, the precepts of social justice have been implemented in the Ambulu Market. 2) The form of economic empowerment in the Ambulu Market is carried out by the traders themselves, such as repairing kiosks and trading businesses. Whereas the Market Office has the role of controlling and controlling the market, so that trading activities in the ambulu market can run smoothly. In addition, the Market Office is still trying to complete land certification. After completion, the Dinas submits a request for renovation of the building to the local government.

Key words: Pancasila Economy, Market Empowerment.

Abstrak: Gagasan Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ekonomi Pancasila harus terkait langsung dengan ekonomi rakyat kecil, dan bertumpu pada moralitas yang mengedepankan

gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan sebagaimana yang telah terkandung dalam pasal 33 UUD 1945.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dalam penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive* serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah; 1) Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu sudah terimplementasikan. Dimulai dari sila pertama di Pasar Ambulu nilai etika dan moral sangatlah dikedepankan. Dibuktikan dengan tidak adanya gejala kriminal apapun yang menyebabkan terjadinya keresahan. Sila yang kedua di Pasar Ambulu nilai kemanusiaan dan nilai sosialnya tinggi. Setiap ada kegiatan sosial, para pedagang di Pasar Ambulu sangatlah antusias dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Selain itu, antar sesama pedagang mereka juga mengedepankan nilai-nilai gotong royong serta tolong menolong antar sesama. Sila Pancasila yang ketiga di Pasar Ambulu sudah menerapkan nilai-nilai persatuan terbukti dengan kekompakan serta adanya organisasi yang mempersatukan para pedagang organisasi tersebut adalah IPPMA. Sila keempat didalam Pasar Ambulu adalah pemberian fasilitas dalam bentuk kios yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang itu sendiri dan dalam penentuan harga menerapkan sistem tawar menawar. Dan yang terakhir adalah sila kelima yang merupakan ujung harapan dari semua Sila. Di Pasar Ambulu tingkat kesejahteraan dari para pedagang tidak ada ketimpangan. Artinya, sila keadilan sosial sudah terimplementasikan di Pasar Ambulu. 2) Bentuk pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu dilakukan oleh para pedagang itu sendiri seperti memperbaiki kios dan usaha melariskan dagangan. Sedangkan Dinas Pasar memiliki peran menertibkan dan mengawasi pasar, agar aktifitas jual beli di pasar ambulu bisa berjalan lancar. Selain itu, Dinas Pasar masih berusaha menyelesaikan sertifikasi lahan. Setelah selesai kemudian Dinas mengajukan permohonan renovasi bangunan kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci: Ekonomi Pancasila, Pemberdayaan Pasar.

A. Pendahuluan

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang digali sedalam-dalamnya oleh bung Karno dari sejarah bangsa Indonesia sendiri, untuk dijadikan sebagai ideologi serta pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Pancasila sebagai *Weltanschauung* berarti nilai-nilai pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan praksis kehidupan di dalam masyarakat bangsa Indonesia yang diatur oleh nilai-nilai Pancasila.¹

¹ Yudistira, "Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa" *UNNES*, 2 (2016), 424.

Negara Indonesia dengan cita-cita kebangsaan yang besar, sebagaimana yang telah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni menciptakan “masyarakat adil dan makmur”, tentu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Pancasila seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila Sila ke lima yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Cita-cita “masyarakat adil dan makmur” akan tercapai jika bangsa Indonesia mampu menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi. Sebab, Pancasila harus menjadi dasar bagi sistem perekonomian di Indonesia. Implementasi Pancasila dalam ekonomi sering kita sebut dengan istilah “Ekonomi Pancasila”.

Gagasan Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1980 istilah Ekonomi Pancasila mulai populer, yakni dengan munculnya pendapat seorang Guru Besar dari Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Mubyarto, yang mengemukakan pendapatnya tentang Ekonomi Pancasila, dan mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila. Artinya mekanisme bekerjanya (sistem) Ekonomi Pancasila didasarkan pada data-data riil ekonomi yang moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio demokratik. Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi normatif (*das sollen*) tetapi ekonomi positif (*das sein*) sekaligus normatif, karena menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia Indonesia yang merupakan *homo socius*, *homo ethicus*, sekaligus *homo economicus* dalam sistem ekonomi yang berdasar atas kekeluargaan”.²

Artinya, Ekonomi Pancasila harus terkait langsung dengan ekonomi rakyat kecil, dan bertumpu pada moralitas yang mengedepankan gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan sebagaimana yang telah terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. Namun demikian, peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian rakyat belum ada kebijakan yang cukup berarti. Dewasa ini, sangat terasa bagi kita orientasi pembangunan pemerintah masih serba elitis, dimana pembangunan proyek mega infrastruktur menjadi salah satu kebijakan andalan pemerintah. Bahkan baru-baru ini, pemerintah membuat kebijakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan dengan maksud pemerataan pembangunan, sehingga menghabiskan dana sebesar 466 Triliun. Tidak kemudian dana itu digunakan untuk memberikan perhatian lebih dalam meningkatkan pemberdayaan perekonomian rakyat kecil. Selain itu, sikap dengan mudah menentukan kenaikan harga, semisal naiknya BPJS dan setoran listrik, menunjukkan hal itu dengan jelas bahwa prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” belum sepenuhnya

² Hastangka, “Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto”, *Jurnal Filsafat*, 1 (April, 2012), 8.

diterapkan. Tentulah kenaikan harga itu harus menunggu kenaikan pendapatan terlebih dahulu, bukan sebaliknya.³

Ekonomi Pancasila, memiliki cita-cita mewujudkan kesejahteraan sosial melalui proses bersama atau gotong royong, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*Humanisme*) dengan melakukan distribusi yang adil dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu diwujudkan melalui Ekonomi Pancasila yang dilandasi oleh nilai-nilai etik religius yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Salah satu contoh penerapan nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam perekonomian rakyat kecil adalah pada kegiatan pasar tradisional. Sebab, pasar tradisional merupakan bagian yang melekat dari kehidupan sosial masyarakat, yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan norma serta adat di daerah tersebut. Hingga kemudian, pasar tradisional mampu menjadi sarana kegiatan ekonomi yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan rakyat. Pasar tradisional juga memiliki aktifitas jual beli yang sederhana, disana terjadi tawar menawar dengan alat pembayaran berupa uang tunai.⁴

Dalam pasar tradisional tidak ada peraturan yang ketat, hanya peraturan antar pedagang saja, sehingga hal itu akan memudahkan kepada semua pedagang untuk keluar masuk pada pasar tradisional. Bahkan, pasar tradisional memperbolehkan pedagang yang berbeda, tetapi menjual barang yang sejenis. Artinya, pasar tradisional sangat mengedepankan prinsip kerakyatan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam setiap aktifitasnya, sebagaimana yang terakandung dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945.

Oleh sebab itu, pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya dan juga mempertahankan eksistensinya, sebab ia adalah representasi dari ekonomi rakyat, serta tempat bergantungnya para pedagang kelas kecil menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, nelayan atau produsen lainnya yang berlatar belakang rakyat kecil.

Salah satu pasar tradisional Indonesia terdapat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yaitu pasar Ambulu, yang terletak di samping alun-alun Kecamatan Ambulu. Pasar Ambulu, merupakan pasar tradisional yang mampu bertahan serta masih eksis meski keberadaannya mulai terancam sejak hadirnya pasar modern di sekitarnya, seperti Dira dan La Riso.

Pasar Ambulu, beroperasi setiap hari mulai pukul 03.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB untuk pedagang yang berjualan di depan pasar yang hanya dengan lesehan dibawah atau tanpa menggunakan kios. Adapun barang yang dijual merupakan kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran, beras, ikan dan kebutuhan dapur lainnya.

³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam, 2006), 168.

⁴ Wahyu Dwi Sutami, "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional", *BioKultur*, 2 (Desember 2012), 128.

Kemudian, setelah aktifitas jual beli yang bertempat di halaman pasar selesai, aktifitas jual beli berlanjut di dalam Pasar Ambulu sampai sore hari, dengan menggunakan kios-kios yang telah disediakan oleh pasar. Barang yang dijualnya pun sangat fariatif dan lebih lengkap, bahkan segala macam kebutuhan telah tersedia. Setelah itu, menjelang petang hingga sekitar jam 21.30 WIB, aktifitas jual beli kembali dilanjutkan didepan Pasar Ambulu. Barang yang di jual berupa berbagai macam jenis pakaian.⁵

Di Pasar Ambulu berbeda dengan pasar tradisional yang lain, sebab di Pasar Ambulu aktifitasnya perekonomiannya hampir 24 jam. Artinya, Pasar Ambulu benar-benar merepresentasikan kebutuhan perekonomian rakyat. Selain itu, dijember bagian selatan, kebanyakan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan jarang yang datang ke Jember kota, karena segala kebutuhan sudah di penuhi di pasar Ambulu.

Dari kondisi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini, yakni kurangnya perhatian terhadap kebijakan dalam pemberdayaan terhadap ekonomi rakyat, sedangkan dalam Ekonomi Pancasila seharusnya perekonomian harus terkait langsung dengan ekonomi rakyat kecil. Maka disini peneliti tertarik untuk meneliti seperti apa nilai-nilai Ekonomi Pancasila beserta pemberdayaan yang diterapkan pada perekonomian pasar tradisional di Ambulu. Berangkat dari hal itu, maka peneliti mengambil judul “Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan Perekonomian Pasar Tradisional Di Ambulu”.

B. Kajian Pustaka

Memilih landasan teori menjadi sangat penting guna mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dan kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut:

a. Sejarah Ekonomi Pancasila

Kecendrungan dalam menolak berlakunya teori ekonomi Barat di Indonesia sebenarnya bukan fenomena yang baru terjadi pada tahun 1980-an. Sebelum Mubyarto membumikan Ekonomi Pancasila sebagai kritik penerapan teori ekonomi barat, pada masa kolonial beberapa sarjana belanda yang mengkaji perekonomian Hindia, juga telah melemparkan sejumlah keraguan atas kemampuan teori ekonomi konvensional dalam menjelaskan dinamika perekonomian ditanah jajahan.

Pada awal abad ke 20, Julius Herman Boeke mengajukan tesis mengenai “*Dual Economies*” (Ekonomi Dualistis) yang sekaligus mengawali munculnya gagasan mengenai teori baru bagi ilmu ekonomi di Indonesia, yang pada waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dalam penelitiannya yang ditulis pada 1910, yang berjudul *Tropisch-Koloniale Staathuishoudkunde: Het Probleem* (Masalah Perekonomian Kolonial Tropik), Boeke pertama kali memperkenalkan tesis mengenai ekonomi dualistis. Dari sudut pandang ekonomi, menurut Boeke, sebuah

⁵Berdasarkan Hasil observasi

masyarakat dapat ditandai oleh tiga unsur, yaitu semangat sosial (*social spirit*), bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan dalam kaitannya itu menentukan ciri khas dari masyarakat bersangkutan, yang disebut sebagai sistem sosial. Dalam sebuah masyarakat dimana pada waktu yang bersamaan memiliki dua atau lebih sistem sosial, dan tiap sistem itu berbeda satu sama lain, disebut masyarakat dualistis atau masyarakat plural (*plural societies*). Ekonomi dualistis merupakan implikasi dari sistem sosial yang juga bersifat dualistis. Dalam perekonomian yang bersifat dualistis, sebagaimana yang ada di Hindia Belanda, maka diperlukan dua pendekatan ekonomi yang berbeda untuk memahami dua modus perekonomian tadi, dimana teori ekonomi Barat tidak berlaku bagi sistem sosial yang bersifat khas.

Tesis Boeke tersebut kemudian mengundang banyak polemik dari para ekonom lain. Inti polemik tersebut adalah pada persoalan benarkah sistem sosial yang berbeda dengan masyarakat Barat, yakni tempat dimana ilmu ekonomi modern lahir dan dibesarkan, memerlukan teori ekonomi tersendiri yang berbeda dengan teori umumnya?. Di antara para ekonom yang terlibat dalam polemik itu adalah Jacob van Gelderen, Dionijs Huibert Burger, dan G.H. van der Kolff. Van Gelderen, dalam tulisannya mengenai perekonomian tropis, berpandangan bahwa teori ekonomi umum bukannya tidak berlaku sama sekali di Hindia Belanda. Ada keadaan-keadaan yang membuat kenapa sebuah teori kadang berlaku dan kadang tidak, dan itu tidak berarti membatalkan keabsahan sebuah teori. Sebagai jalan tengah dari pandangan Boeke, van Gelderen mengemukakan bahwa di samping teori ekonomi murni, memang perlu pula dikembangkan teori ekonomi praktis atau aplikatif dalam bentuk kebijaksanaan ekonomi atau ekonomi-politik.

Lebih jauh, menurut van Gelderen, untuk memahami perekonomian Hindia, teori ekonomi umum memang tidak bisa langsung diterapkan begitu saja, karena ada beberapa faktor yang membuatnya berbeda dari kondisi yang diandaikan oleh teori ekonomi umum. Paling tidak ada tiga faktor yang disebut Boeke dan Gelderen dalam kaitannya dengan kondisi spesifik Hindia Belanda waktu itu, yaitu pertama, faktor sosial-historis Hindia Belanda itu sendiri, kedua adalah faktor geografi ekonomi, dan yang ketiga adalah faktor etnologi.⁶

Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi Indonesia secara komprehensif awalnya dimulai oleh Mohammad Hatta dengan bukunya yang berjudul “Ekonomi Terpimpin” yang diterbitkan pada tahun 1967. Dalam pemikirannya tersebut, Mohammad Hatta mengacu kepada pasal dalam UUD 1945, yakni pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 beserta penjelasannya. Namun demikian, konsep pemikiran dari Mohammad Hatta tersebut tidak kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah dokumen resmi mengenai suatu sistem ekonomi yang dianut oleh Negara Indonesia.

Pada waktu yang bersamaan dengan ditulisnya buku itu oleh Mohammad Hatta, di Indonesia sedang berlaku sistem Ekonomi Terpimpin yang berdampingan

⁶ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyorto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 54.

dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam persepsi masyarakat, karena yang memimpin ekonomi adalah negara dan pemerintah yang menganut Demokrasi Terpimpin, maka dikhawatirkan mengandung unsur otoritarianisme, atau bahkan kediktatoran. Artinya, di dalam persepsi masyarakat, sistem ekonomi Indonesia dikhawatirkan terdapat unsur kontrol, komando dan perencanaan terpusat yang kesemuanya bergabung menjadi dirigisme⁷. Sementara itu, dalam pengertian Hatta, Ekonomi Terpimpin adalah orde ekonomi yang dipimpin oleh pasal-pasal ekonomi UUD 1945.

Sejak tahun 1967, Pemerintah Indonesia yang disebut sebagai Pemerintah Orde Baru, mulai menjalankan suatu strategi pembangunan yang komprehensif berdasarkan TAP MPRS N0. XXIII/1966 tentang “Pembaharuan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan” yang menjadi landasan legalnya. Sekalipun tidak disebut dianutnya suatu sistem ekonomi tertentu, namun dalam konsep pembangunan itu terkandung unsur-unsur sistem ekonomi, misalnya landasan ideologi dan hukum, lembaga-lembaga ekonomi, pranata ekonomi dan sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan. Oleh sebab itu, secara implisit pemerintah Indonesia sedang mengembangkan suatu sistem ekonomi tertentu, tapi masih bersifat arsitektural.

Pada saat itu, corak yang menonjol ada dua. Pertama adalah gagasan ekonomi liberal yang tercermin dalam kebijaksanaan liberalisasi ekonomi, sebagaimana tercermin dalam Peraturan 3 Oktober 1967, UU Penanaman Modal Asing, 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri, 1968. Kedua adalah dilaksanakannya sistem perencanaan terpusat (*centralized planning system*) yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga mencerminkan suatu sistem yang dualistis sebagai suatu perpaduan antara gagasan liberal dan keterpimpinan atau dirigisme.⁸

Kemudian, pada tahun 1965 Emil Salim mempublikasikan dua karangan mengenai Ekonomi Pancasila, yaitu satu dalam bentuk monografi yang diterbitkan oleh Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas), dan yang satu lagi dalam bentuk bab pada sebuah buku yang juga diterbitkan oleh Leknas dan secara khusus dipersembahkan kepada para peserta Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

Didalam karangannya yang pertama, Emil Salim membahas empat sistem ekonomi, diantaranya Ekonomi Swasta, Ekonomi Kontrol, Ekonomi Kolektif, dan Ekonomi Perencanaan Sentral. Pembahasan mengenai model sistem dan teori-teori ekonomi tersebut dilakukannya untuk mencari dan merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan Indonesia.

⁷ Dirigisme adalah doktrin ekonomi dimana negara memainkan peran arahan yang kuat, yang yang bertentangan dengan peran regulasi semata, d aripada peran ekonomi kapitalis.

⁸ M. Dawam Rahardjo, “Menuju Sistem Perekonomian Indonesia”, *LSAF*, 72 (Desember, 2009), 113.

Meskipun yang pertama kali memperkenalkan istilah Ekonomi Pancasila adalah Emil Salim, namun dalam perjalanannya, istilah tersebut lebih melekat pada sosok Mubyarto. Sebab, Mubyarto-lah yang benar-benar menyeriusi dalam mengembangkan gagasan Ekonomi Pancasila tersebut. Hingga kemudian, atas inisiasi Mubyarto, pada tanggal 19 September 1980, gagasan Ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan, yakni sekaligus memperingati hari lahir Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) yang ke-25.⁹

Dari kedua pemikir tersebut, yakni antara Emil Salim dan Mubyarto, kendatipun sama-sama menggunakan istilah Ekonomi Pancasila, namun terdapat perbedaan mendasar antara apa yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila menurut pandangan Emil Salim dengan menurut Mubyarto. Jika Emil Salim, menerjemahkan istilah Ekonomi Pancasila sebagai gagasan sistem perekonomian, atau politik perekonomian. Sedangkan Mubyarto, menggunakan Ekonomi Pancasila sebagai bentuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi Neoklasik (*mainstream economics*). Artinya, perbedaan pokok antara gagasan Emil Salim dengan Mubyarto itu terletak pada aspek konseptual dan historis yang melatari kelahiran istilah tadi. Secara historis, gagasan Ekonomi Pancasila Emil Salim adalah mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi yang akan diambil oleh Orde Baru. Sebaliknya, Ekonomi Pancasila Mubyarto justru hendak memberikan kritik terhadap jalan ekonomi Orde Baru.

Pemikiran tentang ekonomi Pancasila dengan segala liku-likunya mengalami perkembangan terus-menerus. Meskipun bagi sebagian orang awam mungkin dipandang terlalu lamban, atau bahkan bagi sebagian ahli dianggap maju-mundur, namun pergerakannya tidak berhenti. Bila hanya ada satu perbedaan besar antara sistem ekonomi Pancasila dan system ekonomi yang masih belum sempurna yang sekarang masih berlaku di negara kita, maka system ekonomi Pancasila haruslah lebih berkeadilan sosial.¹⁰

b. Pengertian Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang bersumber pada ideologi Pancasila dengan cara mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang sekaligus bersifat moralistik (mengacu pada Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjamin ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional. Dalam sistem Ekonomi Pancasila kita menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem Ekonomi Kapitalis Liberal. Sistem yang lebih tepat adalah sistem ekonomi yang berdasar asas kekeluargaan.¹¹

Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi yang dikerjakan dalam bentuk usaha-usaha bersama

⁹ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 48.

¹⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 7.

¹¹ A. Sofyan Alnashr, "Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam" *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 194.

dengan dilandasi berdasarkan asas-asas kekeluargaan.¹² Menurut Kartasmita Ekonomi Pancasila berakar dari bumi Indonesia. Menurutnya, dalam Ekonomi Pancasila tidak mengenal “*economic animal*” yang satu memangsa yang lain. Kartasmita mendefinisikan pengertian Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialis, karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral, dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etik, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak”.

Swasono dengan jelas memberikan definisi dan landasan Ekonomi Pancasila dalam makalahnya yang berjudul “Orientasi Ekonomi Pancasila” dalam *Wawasan Ekonomi Pancasila* (1981):

“Ekonomi Pancasila adalah Pandangan filsafat dibidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini. Jika Pancasila adalah khas Indonesia, maka Ekonomi Pancasila adalah khas Indonesia. Secara *normatif*, landasan daripada Ekonomi Pancasila adalah apa yang terkandung di dalam Pembukaan, pasal 23, 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945”

Mubyarto dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pancasila: Lintas Pemikiran Mubyarto* (1997: 77) mendefinisikan sistem Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Sistem Ekonomi Pancasila ialah suatu sistem “ideal” atau “idaman” yang didalamnya antara lain kita temukan semangat usaha bersama yang kuat diantara pelaku-pelaku ekonomi. Jika dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan koperasi merupakan bentuk perusahaan yang sesuai maka haruslah diartikan bahwa, dibanding perusahaan negara dan perusahaan swasta, koperasi adalah wadah paling mudah untuk mewujudkan semangat usaha bersama”.¹³

Panjangaran atas pengembangan pemikiran, teori, dan sistem Ekonomi Pancasila diatas menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila adalah konsep normatif atas kondisi ekonomi dunia yang tidak berpihak pada realitas bangsa Indonesia. Secara umum, Ekonomi Pancasila, sebagaimana bisa terbaca dari tulisan para penggagasnya, dimaksudkan sebagai teori ekonomi dengan perspektif Indonesia. Secara konseptual gagasan Ekonomi Pancasila diproyeksikan mencakup dua aspek, yaitu sebagai teori ekonomi murni dan juga sebagai teori ekonomi aplikatif untuk Indonesia.

¹² A. Sofyan Alnashr, “Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam” *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 201.

¹³ Hastangka, “Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto”, *Jurnal Filsafat*, 1 (April, 2012), 40.

Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu solusi moral dan politik untuk mendekonstruksi ekonomi penindasan kolonial menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional.¹⁴ Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Namun dewasa ini, kita belum menggunakan model sistem ekonomi tersebut, sebab hal ini hanya bersifat sementara. Karena nantinya Indonesia akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh.¹⁵

c. Filosofis Ekonomi Pancasila

Meski bisa dikatakan gagasan Ekonomi Pancasila bukanlah gagasan Mubyarto seorang, tapi dalam kenyataannya Ekonomi Pancasila telah menjadi nama kedua bagi Mubyarto, dan kiranya demikian pula sebaliknya. Merujuk kepada penjelasan Mubyarto, Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu pada setiap sila pancasila. Jika sila pancasila dijabarkan maka, sila *ketuhanan yang maha esa* memiliki makna ekonomi harus mendasarkan diri pada moral, karena Tuhanlah yang seharusnya menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini. Kedua, *kemanusiaan yang adil dan beradab*, artinya ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil, menganggap sama semua manusia, satu dengan yang lain tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan atau hak yang lebih tinggi. Ketiga, *persatuan Indonesia*, ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi, bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan napas nasionalisme. Keempat, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, ini adalah prinsip demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang, meski dia itu miskin ataupun lemah, tetap harus diikutsertakan dalam tiap pembuatan kebijakan. Kelima, *keadilan sosial*, ini sudah jelas yang dituju.

Jadi, jika lima sila tersebut kita peras secara analitis, maka sila pertama dan sila kedua menjadi dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan. Kemudian, sila ketiga dan empat adalah caranya, berupa nasionalisme dan demokratis. Lalu sila kelima adalah tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶

Keadilan Sosial merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁷

¹⁴ Sri-Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: Universitas Sriwijaya Press, 2015), 106.

¹⁵ Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UIP, 1980), 98.

¹⁶ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

¹⁷ A. Sofyan Alnashr, “Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam” *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 204.

Kerangka filosofis Ekonomi Pancasila bertitik tolak pada sila-sila Pancasila. Pemahaman tentang nilai-nilai dan sila-sila Pancasila menjadi ukuran untuk menerjemahkan mekanisme atau proses kerja Ekonomi Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa dan dasar negara mempunyai peranan penting dalam praktek berekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan ilmu ekonomi Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila, sekurang-kurangnya memiliki lima ciri pokok, yakni yang pertama, ekonomi “disusun” bukan “tersusun” artinya tidak menyerahkan seluruhnya pada mekanisme pasar. Kedua, dilaksanakan sebagai usaha bersama. Ketiga, negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun tidak menampilkan peranan masyarakat (swasta). Keempat, kegiatan produksi dilaksanakan pada atas dasar kepemilikan dan kepemilikan anggota masyarakat. Kelima, modal ekonomi tidak terbatas pada modal kapital, namun juga modal intelektual, modal lingkungan, modal budaya, dan modal sosial.

Pancasila sebagai landasan filosofis sistem perekonomian nasional mengisyaratkan bahwa *founding father Indonesia* memimpikan sebuah prinsip kebersamaan memuat nilai luhur dalam melihat nilai luhur manusia sebagai hakikat hidup berbangsa. Ada tiga makna dasar dari esensi kebersamaan, yakni pengakuan kedaulatan rakyat dalam berekonomi, kesetaraan sebagai bagian dari peri kemauniasaan dan peri keadilan, dan kemandirian sebagai jati diri bangsa.

Maka dari itu, sikap dasar mengutamakan kepentingan pribadi perorangan sebagai sukma kapitalisme itulah yang ditentang oleh *founding father* kita. Ide ini sama dengan pendapat Mohammad Hatta yang menegaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama dari pada kemakmuran orang seorang. Pandangan ini kemudian dirumuskannya kedalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu ciri paling utama dari “demokrasi ekonomi” di Indonesia.

Lebih jauh lagi, dalam undang-undang tersebut Hatta mengemukakan dalam prasarannya pada Konferensi Ekonomi di Yogyakarta tahun 1946, sebagai berikut: perekonomian suatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama, kekayaan tanahnya. Kedua, kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan Internasional. Ketiga, sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya. Terhadap bangsa Indonesia harus ditambah satu pasal lagi, yaitu sejarahnya sebagai tanah jajahan.¹⁸

Dasar moral Ekonomi Pancasila mengedepankan gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sejalan, sesuai, dan setia pada asas-asas Pancasila, sedangkan dasar moral ekonomi Smith adalah kebebasan individu. Namun demikian, Mubyarto juga mengakui bahwa Ekonomi yang dikembangkannya merujuk pada ajaran asli ilmu ekonomi Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi yang tidak terlepas dari faktor etika dan moral karena didalam tulisan

¹⁸ Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, *Menggal Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018),20.

Smith yang pertama (*The Theory of Moral Sentiment*, terbit pada 1759) dijelaskan bahwa manusia adalah *homo socius*. Kemudian dalam bukunya yang kedua, *Wealth of Nations (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, terbit pada 1776) Smith menulis bahwa manusia hanya *homo economicus*. Sedangkan yang di ajarkan kepada mahasiswa di Indonesia menurut Mubyarto hanya terbatas pada *homo economicus*.

Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila memiliki lima ciri, yaitu yang pertama, roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan. Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih dicari-cari tetapi harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini dianut oleh bangsa Indonesia, terutama pada masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan. Ekonomi Pancasila menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem ekonomi kapitalis liberal. Sebab, Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah menolak penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, dan individualisme. Sistem ekonomi yang menganut asas kekeluargaan juga dapat diartikan membangun perekonomian secara mandiri, dengan pengertian tidak diperbolehkan menggantungkan pada asing.¹⁹

Dalam agama Islam, juga menjelaskan bahwa keadilan sosial adalah tuntutan mutlak dalam ajaran Islam, baik rumusan “hendaklah kalian bertindak adil (أَتَعْدِلُوا)” maupun keharusan yang menjelaskan “menegakkan keadilan (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ)” berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci al-Quran.²⁰ Secara umum, Islam memang memperhatikan susunan masyarakat yang adil dengan membela nasib mereka yang miskin/lemah, seperti terlihat dalam ayat suci berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

Artinya: Apa yang dilimpahkan (dalam bentuk pungutan *fai*) oleh Allah atas kaum (penduduk sekitar madinah), maka harus digunakan bagi Allah, utusan-Nya, sanak keluarga terdekat, pengemis dan pejalan kaki di jalan Allah. Agar

¹⁹ A. Sofyan Alnashr, “Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam” *Jurnal Islamic Review*, 4 (A, pril, 2015), 205.

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam, 2006), 168.

supaya harta yang terkumpul itu tidak hanya berputar/beredar dikalangan orang-orang kaya saja dilingkungan kalian. (Qs al-Hasyr [59]:7).²¹

d. Dasar Yuridis Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila Mubyarto memiliki landasan yuridis konstitusional, sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara Indonesia, yang letaknya pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, maka seluruh isi jiwa UUD 1945 harus ditafsirkan sesuai dengan falsafah Pancasila. Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem guna mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang menyangkut bidang ekonomi, tercantum dengan jelas pada Bab XIV, pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Didalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD) 1945, tentang pasal 33 tersebut, dapat dinyatakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau perilaku anggota-anggota masyarakat.
- 2) Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.
- 3) Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
- 4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
- 5) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi Indonesia, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²²

Pasal 33 tersebut sudah jelas memberikan legalitas terhadap penyusunan perekonomian bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila yang disusun oleh Mubyarto sudah memiliki fondasi yuridis pada waktu itu untuk dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sistem ekonomi, dan pengembangan teori ekonomi alternatif di Indonesia.

Berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan pada pasal 33 diatas, dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem Ekonomi Pancasila. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam Ekonomi Pancasila antara lain meliputi tujuh hal. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, di implementasikan dalam bentuk pengembangan koperasi atau usaha kecil milik rakyat lainnya, sebagaimana terkandung dalam pasal 33 ayat 1.

²¹ Ibid., 171.

²² Mubyarto, Boediono, *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPFE, 1981), 125.

- 2) Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, di implementasikan dalam bentuk pengembangan BUMN, sebagaimana terkandung dalam pasal 33 ayat 2.
- 3) Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana terkandung dalam pasal 33 ayat 3.
- 4) Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, di implementasikan dalam bentuk memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi.
- 5) Menjaga stabilitas moneter.
- 6) Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana terkandung dalam pasal 27 ayat 2.
- 7) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana terkandung dalam pasal 34.²³

Kemudian, dalam perkembangannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dengan amandemen Undang Undang Dasar pada tahun 2002. Dalam naskah asli Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 tersebut dituangkan pada Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial, sedangkan berdasarkan hasil Amandemen pada tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada Bab XIV dengan mengalami perubahan judul menjadi Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial.

Bunyi ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, hasil amandemen tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Perekonomian di susun sebagai sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pengertian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, apabila diperhatikan dengan seksama, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, pembangunan yang besar dikerjakan oleh Pemerintah atau dipercayakan kepada badan hukum yang tertentu di bawah penguasaan pemerintah. Hal ini dilakukan berdasarkan pedomannya mencapai "... sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, pembangunan yang kecil-kecil dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Hingga kemudian, koperasi dapat

²³ Revrisond Baswir, "Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme", *Gema Keadilan*, 2 (September, 2015), 4.

berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.²⁴

Dari pokok-pokok unsur yang terkandung dalam penjelasan tersebut diatas bahwa sifat-sifat dan ciri-ciri sistem ekonomi yang harus disusun adalah adanya demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat/sosial, asas kekeluargaan, ikut campurnya negara secara langsung dalam pengurusan cabang-cabang produksi dan sumber-sumber alam yang penting. Sifat-sifat dan ciri-ciri yang demikian tidak terdapat dalam sistem kapitalisme. Pun demikian, tidak semua sifat-sifat dan ciri-ciri yang demikian terdapat pada sistem sosialisnya negara-negara lain, tetapi semua sifat-sifat dan ciri-ciri terdapat didalam situasi, kondisi dan kepribadian Indonesia. Sehingga demikian, ekonomi yang sesuai dengan perumusan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, dan yang sesuai dengan Pancasila adalah Ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila harus selalu berjalan sejajar dengan prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip demokrasi ekonomi harus berdasarkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi yang didasarkan dengan demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan.²⁵

e. Tantangan Sistem Ekonomi Pancasila

Indonesia adalah sebuah negara yang telah mengalami penjajahan selama 3,5 abad, tentu tidak dapat mengingkari kenyataan telah terbangunnya struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia. Sebab, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengoreksi struktur perekonomian yang bercorak kolonial tersebut. Selain itu, liberalisasi bukan hal baru bagi Indonesia, tetapi telah berlangsung sejak era kolonial. Dari sini sangat jelas bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk menerapkan sistem ekonomi yang sesuai, bukanlah perjuangan yang mudah, karena kendala terbesar justru datang dari pihak kolonial.

Kemudian, setelah bangsa Indonesia merdeka, pihak kolonial hampir terus menerus menjatuhkan upaya bangsa Indonesia dalam usaha menerapkan ekonomi yang sesuai untuk bangsanya sendiri. Secara ringkas, yang dilakukan oleh pihak kolonial untuk mencegah terselenggaranya ekonomi yang sesuai itu adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya agresi I dan II pada 1947 dan 1948. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah berdirinya NKRI yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Kedua, dipaksanya bangsa Indonesia untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Ketiga, syarat ekonomi itu adalah:

- 1) Bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.

²⁴ Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 9 (Maret, 2012), 62.

²⁵ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2018), 20.

- 2) Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
- 3) Bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Ketiga, dilakukannya berbagai tindakan adu domba menyusul dilakukannya tindakan pembatalan KMB secara sepihak oleh pemerintah Indonesia pada 1956. Tindakan-tindakan itu antara lain terungkap pada meletusnya peristiwa PRRI/Permesta pada 1958. Keempat, diselundupkannya sejumlah sarjana dan mahasiswa ekonomi Indonesia ke AS untuk mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak liberal-kapitalistis sejak 1957. Para ekonom yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley ini sengaja dipersiapkan untuk mengambil alih kendali pengelolaan perekonomian Indonesia pasca penggulingan Soekarno pada 1966. Kelima, dilakukannya sandiwara politik untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno pada 30 September 1965, yaitu pasca terbitnya UU No. 16/1965 pada Agustus 1965, yang menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia.

Keenam, dipaksanya Soekarno untuk menandatangani empat UU sebelum ia secara resmi dilengserkan dari kekuasaannya. Keempat UU itu adalah:

- 1) UU No. 7/1966 tentang penyelesaian masalah utang-piutang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.
- 2) UU No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota ADB.
- 3) UU No. 9/1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia.
- 4) UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Ketujuh, dibangunnya sebuah pemerintahan kontra-revolusioner di Indonesia sejak 1967. Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini, para ekonom "Mafia Berkeley" yang sejak jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh AS, secara sistematis berusaha membelokkan orientasi penyelenggaraan perekonomian Indonesia dari ekonomi yang berbasis kerakyatan menuju ekonomi pasar neoliberal. Tindakan pembelokan orientasi tersebut didukung sepenuhnya oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB dengan cara mengucurkan utang luar negeri.

Kedelapan, dilakukannya proses liberalisasi besar-besaran sejak 1983, yaitu melalui serangkaian kebijakan yang dikemas dalam paket deregulasi dan debirokratisasi. Kesembilan, dipaksanya Soeharto untuk menandatangani pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara terinci melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan IMF pada 1998, yaitu sebelum ia secara resmi dipaksa untuk mengakhiri kekuasannya melalui sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan reformasi. Perlu diketahui, dalam sejarah perekonomian Inggris, gerakan reformasi serupa dimotori antara lain oleh David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Thomas R. Malthus, dan John S. Mill (Giersch, 1961). Kesepuluh, pada 2002, dilakukannya amandemen terhadap Pasal

33 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Ekonomi Pancasila. Melalui perdebatan yang cukup sengit, ayat 1, 2, dan 3, berhasil dipertahankan.²⁶

Kendatipun upaya dalam menggantikan pasal 33 dengan sistem ekonomi pasar tidak berhasil, namun telah terjadi penambahan pada pasal 34 dengan pasal-pasal kesejahteraan sosial. Sungguh pun demikian, jika penjelasan pasal 33 berhasil dihilangkan, maka pasal ini menjadi terkebiri terutama menyangkut konsep demokrasi ekonomi dan kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional. Bahkan, seandainya telah terjadi penghapusan pasal ekonomi tersebut, maka Ekonomi Pancasila akan kehilangan dasar pijakan pula, sehingga konsep Ekonomi Pancasila akan berakhir.

Pada tataran praktik, awal diterapkannya paham ekonomi liberal yakni pada april 1967, tiga bulan setelah pemberlakuan Undang-Undang Penanaman modal Asing (UU PMA) No 1/1967, *Freeport Sulphur Incorporated* menandatangani sebuah kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambah cadangan emas dan tembaga di Irian Jaya, dengan memperoleh masa bebas pajak selama tiga tahun serta konsesi pajak sebesar 35 untuk tujuh tahun berikutnya dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain lima persen pajak penjualan. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontraknya di Indonesia sekaligus menandai awal perubahan sistem Ekonomi Indonesia Menjadi Liberal. Hingga kemudian, di bawah bendera globalisasi, dan dalam tekanan kebutuhan penerimaan APBN dan pembayaran hutang luar negeri, telah terjadi proses privatisasi perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar ke tangan modal asing. Yang menjadi sasaran privatisasi ini adalah BUMN yang kini jumlahnya berkurang dari 240-an menjadi 130-an.²⁷

f. Landasan Sosial Ekonomi

Dalam sebuah perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, adalah sebuah keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip kekeluargaan, gotong royong dan kemandirian.

1) Kekeluargaan

Di Indonesia konsep kekeluargaan pada dasarnya sudah terimplementasikan sejak zaman dahulu, sebab prinsip kekeluargaan ini merupakan cirihas masyarakat Nusantara yang sangat memegang adat “ketimuran”. Jika prinsip kekeluargaan ini diterapkan pada sistem perekonomian maka perekonomian tersebut akan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan pilihan akhir dari peradaban manusia ditengah ancaman ekonomi dunia.

2) Gotong Royong

Setelah prinsip kekeluargaan sudah diterapkan, selanjutnya adalah penerapan prinsip gotong royong, sebab gotong royong adalah buah dari semangat kekeluargaan yang memiliki ciri kesetaraan. Bahkan, gotong royong juga merupakan bentuk dari prinsip kekeluargaan yang terjalin. Tanpa adanya landasan gotong royong, Ekonomi Pancasila tidak akan terimplementasikan dengan baik.

²⁶ Revrison Baswir, “Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme”, *Gema Keadilan*, 2 (September, 2015), 5.

²⁷ M. Dawam Rahardjo, “Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Pancasila”, *UNISIA*, 53 (Maret 2004), 211.

3) Kemandirian

Kemandirian adalah buah dari prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang sudah terimplentasikan. Oleh sebab itu, kemandirian menjadi penting maknanya karena bisa menjadi sekema bangsa, khususnya dalam pencapaian kesejahteraan umum atau dalam undang-undang sering kita sebut dengan istilah “masyarakat adil dan makmur” sebagaimana yang dicita-citakan.²⁸

g. Pemberdayaan Ekonomi

Swasono mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional. Sehingga, langkah-langkah yang nyata harus di upayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Sedangkan yang dinamakan kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.²⁹

Pemberdayaan ekonomi dianggap sebagai sebuah strategi pembangunan yang banyak banyak diterima oleh masyarakat, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan dalam kebijakan pemerintah. Dilain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah masih belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Di Indonesia, pola pembangunannya terlalu berorientasi pada pertumbuhan. Selama rezim orde baru berkuasa dan dengan semangat sentralisme kekuasaan yang kuat telah menanamkan bibit-bibit ketidakpuasan dan sekaligus konflik sosial sebagai bom waktu di berbagai daerah. Diskursus model pembangunan tahun 80-an yang bertumpu pada masyarakat (*people centered development*) yang bertujuan untuk pemberdayaan rakyat, ternyata hanya sekedar wacana dan kenyataannya lapitalisme semu justru menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial.³¹

²⁸ Nikmatul Masrurroh, Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya, Jakad Publishing, 2018), 25.

²⁹ Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2,8.

³⁰ Andi Nu Graha, “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi”, *MODERNISASI*, 5,(Juni 2009), 118.

³¹ Hg. Suseno tw, “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Ukm Dan Entrepreneurship Di Kalangan Pengusaha Kecil” *Jurnal widya manaiemen & akuntansi*, 3 (april 2003), 64.

h. Pengertian Pasar

Pasar merupakan tempat berkumpulnya sejumlah penjual dan pembeli di mana terjadi transaksi jual-beli barang ataupun jasa yang ada di sana. Menurut cara transaksinya pasar dibedakan menjadi dua, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan pokok. Sedangkan di pasar modern, barang-barang yang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri.³²

Transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di pasar sudah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan volume dari transaksi tersebut.³³ Proses bertemunya penjual dan pembeli pada pasar menjadi indikator tingkat perekonomian masyarakat. Sebab, semakin besar volume transaksi yang terjadi di suatu pasar menunjukkan perekonomian yang stabil. Bahkan, kegiatan ekonomi yang terjadi di sebuah pasar merupakan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.³⁴ Namun, dewasa ini pengertian tersebut tidaklah sepenuhnya benar, karena seiring kemajuan teknologi penjual dan pembeli dapat melakukan aktifitas jual beli dengan cara tidak bertemu secara langsung.

Didalam pasar, terdiri dari semua pelanggan yang memiliki berbagai macam kebutuhan atau keinginan, yang kemudian melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Aktifitas pertukaran barang atau jasa ini merupakan bagian dari perekonomian. Sedangkan pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut transaksi. Sebuah pasar muncul karena dibangun atas interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

i. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut Perpres No.112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.³⁵ Sedangkan menurut Wikipedia³⁶, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjualan dan pembelian secara langsung dan biasanya melalui proses tawar-menawar.

³² Nel Arianty, "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1 (April 2013), 18.

³³ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2015), 44.

³⁴ Afif Noor, "Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern", *Evonomica*, 4 (November, 2013), 110.

³⁵ Anung Pramudyo, "Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta", *JBMA*, 2 (Maret, 2014), 82.

³⁶ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional

Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Pedagang di pasar tradisional ini kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan atau pedesaan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.³⁷

j. Keunggulan Pasar Tradisional

Didalam sebuah pasar tentu memiliki kelebihan serta kekurangan. Pun yang terjadi pada pasar tradisional. Adapun keunggulan yang ada pada pasar tradisional diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, pembeli memiliki kesempatan untuk melakukan tawar menawar. Dengan adanya tawar menawar ini, membuat penjual dengan pembeli akan terjadi sebuah interaksi sosial. Sehingga diantara penjual dan pembeli akan saling bertegur sapa, bahkan ada sentuhan humanis, hingga kemudian mempunyai kedekatan personal maupun emosional. Didalam pasar tradisional, terkadang antara penjual dan pembeli sudah saling mengenal dengan baik, bahkan mengenal keluarganya masing-masing dan saling mengundang jika mempunyai hajatan. Hal ini tentunya tidak akan kita dapatkan apabila berbelanja di pasar modern.

Keunggulan yang kedua adalah masalah kualitas. Kualitas yang dimaksud disini dikaitkan dengan kesegaran barang yang dijual, misalnya untuk sayur-mayur, daging, dan ikan. Sehingga, pembeli yang teliti akan dengan mudah mendapatkannya dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasar modern. Ketiga, pasar tradisional juga buka lebih pagi jika dibandingkan dengan pasar modern. Bahkan, sejak dinihari kegiatan perekonomian di pasar tradisional sudah dimulai. Keempat, yang menjadi keunggulan pasar tradisional adalah konsumen akan dengan cepat mengetahui adanya perubahan naik turunnya harga. Bahkan konsumen akan dengan cepat dapat membandingkan harga antara penjual yang satu dengan penjual lainnya, dengan demikian konsumen akan mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya, tentunya dengan harga yang lebih murah.

Sementara itu, pasar tradisional merupakan cerminan dari keberadaan kehidupan sosial di dalam suatu wilayah tertentu. Pasar tradisional juga merupakan pusat kebudayaan, dimana segala macam ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terekspresikan didalamnya. Intensitas interaksi di dalam pasar tradisional tidak akan kita temukan di pasar modern.

Pasar sebagai pusat budaya terlihat karena Pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang jual beli. Tetapi lebih daripada itu, pasar tradisional menjadi ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam

³⁷ Anung Pramudyo, "Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta", *JBMA*, 2 (Maret, 2014), 82.

upaya membangun wawasan kebangsaan untuk ikut membangun suatu bentuk kebudayaan masa depan yang tak lepas dari akar tradisinya yakni “Gotong Royong”.³⁸

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelian lapang (*field research*) dengan data dan cara analisa menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik dan pengumpulan data.³⁹

Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh para penjual dan pembeli yang melakukan aktifitas jual belinya di pasar tradisional Ambulu. Baik perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh. Selain itu, peneliti juga melihat secara langsung kondisi obyektif yang ada di Pasar Ambulu, agar peneliti mengetahui bagaimana fakta, realita, gejala, dan peristiwa yang terjadi di pasar Ambulu. Hingga kemudian, peneliti dapat mengetahui bagaimana Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu, serta dapat mengetahui bagaimana peberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat pada pasar tradisional di Ambulu. Pasar Ambulu adalah salah satu pasar rakyat yang terdapat di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang didirikan sekitar tahun 1978-an. Pasar ini merupakan pasar yang menopang ekonomi rakyat di daerah ambulu dan sekitarnya, yang lokasinya berada di alun-alun Kecamatan Ambulu. Pasar Ambulu adalah pasar tradisional yang sangat potensial melayani kebutuhan masyarakat khususnya di Jember selatan. Karena letaknya berada di jember selatan alias jauh dari pusat kota, maka Pasar Ambulu menjadi salah satu andalan perbelanjaan di Jember selatan.

Di pasar ini terdapat banyak pedagang dengan berbagai jenis dagangannya. Adapun barang yang dijual merupakan kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran, beras, ikan dan kebutuhan dapur lainnya. Selain itu, berbagai macam jenis pakaian juga tidak luput dijual di Pasar Ambulu ini. Dari banyaknya pedagang disini, tentunya harga yang ditawarkan dari tiap pedagang sangatlah variatif dan juga

³⁸ Anung Pramudyo, “Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta”, *JBMA*, 2 (Maret, 2014), 84.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 9.

masih menerapkan sistim tawar menawar dalam menentukan harga. Namun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong antar sesama pedagang, ketidak samaan harga tersebut tidaklah menyebabkan salah satu pedagang merasa dirugikan.

Alasan memilih lokasi ini karena Pasar Ambulu adalah merupakan pasar tradisional yang bertempat di Kecamatan Ambulu, yang mampu menopang seluruh kebutuhan masyarakat di Ambulu dan bahkan Kecamatan- Kecamatan di sekitarnya. Sehingga tidak heran jika masyarakat di Ambulu jarang berbelanja ke Jember, sebab segala macam kebutuhan di pasar ambulu sudah tersedia.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Karena disini peneliti menggunakan *Purposive*, maka peneliti akan menetapkan sampel yang akan dimintai keterangan dengan cara memilih sampel diantara para pelaku ekonomi yang setiap hari terlibat aktif dalam aktifitas jual beli di Pasar Ambulu. Kemudian peneliti menentukan satu informan kunci untuk digali sumber informasinya. Informan kunci yang dimaksud peneliti disini adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Ketua Ikatan Pedagang Pasar Ambulu (IPPMA) Bapak Suryanto yang menjadi informan kunci.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan yang merupakan masyarakat yang melakukan aktifitas jual beli di Pasar Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Adapun kriteria informan yang akan dipilih oleh peneliti adalah yang pertama dinas pasar, dalam hal ini peneliti memilih Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP) Bapak Sugung Puryanto sebagai informan yang akan dimintai keterangan. Pada subjek yang kedua peneliti langsung mencari informan kunci, adapun informan kunci tersebut adalah pelaku pedagang pakaian yang bernama Bapak Suryanto. Alasan mengapa disini peneliti memilih Pak Suryanto sebagai informan kunci adalah karena Pak Suryanto adalah orang yang setiap hari terlibat langsung dalam aktifitas jual beli di Pasaar Ambulu. Selain itu, Pak Suryanto juga berkedudukan sebagai ketua Ikatan Pedagang Pasar Malam Ambulu (IPPMA). Selain Pak Suryanto, peneliti menambahkan informan lain sebagai pembanding. Informan tersebut adalah Ibu Mutmainnah sebagai pedagang sayur, yang beralamatkan di Desa Karang Anyar Ambulu. Dan Bapak H. Amril sebagai pedagang konveksi yang beralamatkan Krajan Ambulu. Selanjutnya, peneliti disini mencari informan tambahan, adapun informan tambahan adalah konsumen yang sering melakukan jual beli di Pasar Ambulu dan bekerja di MI Miftahul Ulum 29 Kauman Ambulu, informan tersebut adalah Bapak Imam Syafi'i. Alasan memilih informan tersebut adalah karena beliau sering belanja di Pasar Ambulu. Selain itu, karena beliau bekerja di dekat Pasar Ambulu diharapkan informasi tentang Pasar Ambulu bisa mengikuti perkembangan. Disini peneliti juga menambahkan informan tambahan yang berposisi sebagai konsumen, yaitu Ibu Umi Hanik dari Sumberan Ambulu. Dan Ibu Liul Isnaifah dari Sidodadi Tempurejo.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian pada Pasar Ambulu ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengamatan yang terdiri dari tiga komponen tersebut, merupakan sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati implementasi nilai-nilai ekonomi pancasila di Pasar Ambulu.

Setelah pengelolaan data selesai maka proses selanjutnya adalah menganalisis data untuk mendapatkan sebuah gambaran yang utuh terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴⁰ Dengan mempertimbangkan jenis penelitian yang dilakukan, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction* dan *display, conclusion drawing/verification*.

Agar peneliti bisa mendapatkan temuan yang absah, maka peneliti disini akan menguji kredibilitasnya dengan cara: memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, Analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan *member check*, yakni peneliti mengecek data kepada pemberi data, untuk mengetahui data yang diperoleh sudah valid atau belum.⁴¹

D. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila dalam Pemberdayaan Perekonomian Pasar Tradisional di Ambulu, perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

a. Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu

Berdasarkan analisis data di atas, diperoleh pemahaman bahwa, nilai-nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu sudah terimplementasikan. Dimulai dari sila pertama *Ketuhanan yang Maha Esa*. Di Pasar Ambulu nilai etika dan moral sangatlah dikedepankan. Dibuktikan dengan tidak adanya gejala-gejala dalam bentuk kriminalitas ataupun premanisme atau dalam bentuk apapun yang menyebabkan terjadinya keresahan. Bahkan, untuk lebih menjaga keamanan dan ketertiban, pada saat Pasar Ambulu berada di puncak keramaian yakni pada saat bulan puasa, polisi datang berpatroli di Pasar Ambulu agar kemungkinan terjadinya kriminalitas dapat dihindarkan. Sebab, Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialis, karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral, dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etik.⁴² Selain itu, hal ini senada dengan pernyataan Mubyarto yang mengatakan bahwasanya ekonomi haruslah mendasarkan diri pada moral, karena Tuhanlah yang menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini.⁴³ Bahkan,

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 131.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 185.

⁴² Hastangka, "Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto", *Jurnal Filsafat*, 1 (April, 2012), 40.

⁴³ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

menurut Adam Smith dalam tulisannya yang pertama (*The Theory Of Moral Sentiment*, terbit pada 1759, menjelaskan bahwa ekonomi tidak terlepas dari faktor etika dan moral karena manusia adalah *homo socius*, bukan hanya sebatas *homo economicus*.⁴⁴

Selanjutnya mengenai Sila Pancasila yang kedua *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Di Pasar Ambulu, nilai kemanusiaan (*humanisme*) dan nilai sosialnya tinggi. Setiap ada kegiatan-kegiatan sosial para pedagang di Pasar Ambulu sangatlah antusias dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Semisal contoh, jika masjid sedang membutuhkan sumbangan untuk renovasi bangunan, para pedagang selalu memberikan donasinya untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Pun antar sesama pedagang, nilai-nilai sosial juga sangat dikedepankan, hal ini dibuktikan dengan aktifitas mereka yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong serta tolong menolong antar sesama pedagang. Seperti contoh jika ada pedagang kehabisan stok atau bahkan tidak punya stok barang dagangan yang sedang dicari pembeli, maka pembeli langsung diarahkan ke penjual yang memiliki barang yang sedang di cari. Artinya, hal ini sesuai dengan dasar moral Ekonomi Pancasila yang mengedepankan gotong royong, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Bahkan Mohammad Hatta juga menegaskan bahwa di Indonesia kemakmuran Masyarakat atau kemakmuran bersama lebih utama dari pada kemakmuran perorangan atau individu.⁴⁵ Selain itu, Mubyarto juga menjelaskan bahwasanya dalam mengimplementasikan *kemanusiaan yang adil dan beradab* maka ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil dan beradab, menganggap sama semua manusia, satu dengan yang lain tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.⁴⁶

Selanjutnya, mengenai Sila Pancasila yang ketiga *Persatuan Indonesia* didalam Pasar Ambulu sudah menerapkan nilai-nilai persatuan terbukti dengan kekompakan dan juga adanya organisasi yang mempersatukan para pedagang organisasi tersebut adalah Ikatan Pedagang Pasar Malam Ambulu atau yang disingkat IPPMA. Merupakan bentuk persatuan dari pedagang yang mengadakan nasibnya dipasar Ambulu. Artinya, nilai kekeluargaan masih terjalin kuat antar sesama pedagang. Sedangkan Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah menolak penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, dan individualisme.⁴⁷

Selanjutnya adalah Sila Pancasila keempat *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan* didalam Pasar Ambulu juga sudah terimplementasikan. Bentuknya, pemberian fasilitas dalam bentuk kios yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang itu sendiri. Selain itu, dalam penentuan harga, dipasar Ambulu menerapkan sistem tawar menawar antara

⁴⁴ A. Sofyan Alnashr, "Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam" *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 205.

⁴⁵ Nikmatul Masruroh, Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), 20.

⁴⁶ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

⁴⁷ A. Sofyan Alnashr, "Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam" *Jurnal Islamic Review*, 4 (April, 2015), 205.

penjual dengan pembeli, hingga terjadi interaksi untuk menyepakati harga yang ditawarkan oleh para penjual. Tidak kemudian penjual serta merta memberikan harga tetap kepada pembeli. Artinya demokrasi ekonomi sebagaimana terkandung dalam Pancasila sila keempat sudah terimplementasikan dalam bentuk pemberian ruang kepada konsumen untuk menawar barang yang ingin dibeli. Selain itu, terjadinya interaksi antara pedagang dan pembeli adalah bentuk Ekonomi Kerakyatan, sebab hal ini tidak akan terjadi pada pasar modern. Sedangkan yang dimaksud prinsip demokrasi ekonomi adalah bahwa setiap orang, meski dia itu miskin ataupun lemah, tetap harus di ikutsertakan dalam tiap pembuatan kebijakan.⁴⁸

Dan yang terakhir adalah sila kelima *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, yang merupakan ujung harapan dari semua sila. Jadi, jika lima sila tersebut kita peras secara analitis, maka sila pertama dan sila kedua menjadi dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan. Kemudian, sila ketiga dan empat adalah caranya, berupa nasionalisme dan demokratis. Lalu sila kelima adalah tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁹ Dan di Pasar Ambulu tingkat kesejahteraan dari para pedagang tidak ada ketimpangan. Tentu ini disebabkan prinsip gotong royong serta tolong menolong yang selalu diterapkan di Pasar Ambulu. Hal ini senada dengan ajaran agama Islam, yang menjelaskan bahwa keadilan sosial adalah tuntutan mutlak dalam ajaran Islam, baik rumusan “hendaklah kalian bertindak adil (أَتَّقِدِلُوا)” maupun keharusan “menegakkan keadilan (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ)”, berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci al-Quran.⁵⁰ Artinya, sila keadilan sosial sudah terimplementasikan di Pasar Ambulu.

b. Bentuk-Bentuk pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu

Dipasar Ambulu, dalam memberdayakan perekonomian, justru dilakukan oleh para pedagang itu sendiri, seperti memperbaiki kios dan melariskan dagangan. Namun, bukan berarti Dinas Pasar Ambulu tidak memiliki peran sama sekali. Dinas Pasar, memiliki peran menertibkan dan mengawasi pasar, agar aktifitas jual beli di Pasar Ambulu bisa berjalan lancar. Selain itu, dipasar Ambulu dalam usaha memberdayakan perekonomian pasar, Dinas Pasar masih berusaha menyelesaikan sertifikasi lahan yang belum selesai. Sebab, lahan yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan, belum sepenuhnya milik pasar, yakni 40 persen milik pasar sedangkan 60 persen sisanya milik PJKA. Setelah proses sertifikasi sudah selesai, baru kemudian dinas Pasar mengajukan renovasi bangunan kepada pemerintah daerah. Agar para pedagang dan pembeli dapat beraktifitas dengan nyaman di Pasar Ambulu. Hal ini dianggap penting, mengingat pasar tradisional merupakan cerminan dari kehidupan sosial didalam suatu wilayah tertentu.⁵¹ Bahkan, menurut Perpres N0. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan

⁴⁸ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyorto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

⁴⁹ Dumairi, Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyorto* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 21.

⁵⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam, 2006), 168.

⁵¹ Anung Pramudyo, “Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta”, *JBMA*, 2 (Maret, 2014), 82.

dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.⁵²

E. Kesimpulan

Nilai-nilai Ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu sudah terimplementasikan. Dimulai dari sila pertama di Pasar Ambulu nilai etika dan moral sangatlah dikedepankan. Dibuktikan dengan tidak adanya gejala-gejala kriminal dalam bentuk apapun yang menyebabkan terjadinya keresahan.

Selanjutnya Sila yang kedua. Di Pasar Ambulu, nilai kemanusiaan dan nilai sosialnya tinggi. Setiap ada kegiatan-kegiatan sosial para pedagang di Pasar Ambulu sangatlah antusias dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Selain itu, antar sesama pedagang pun demikian, hal ini dibuktikan dengan aktifitas mereka yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong serta tolong menolong antar sesama pedagang.

Selanjutnya Sila Pancasila yang ketiga. Didalam Pasar Ambulu sudah menerapkan nilai-nilai persatuan terbukti dengan kekompakan para pedagang serta adanya organisasi yang mempersatukan para pedagang organisasi tersebut adalah Ikatan Pedagang Pasar Malam Ambulu (IPPMA). Merupakan bentuk persatuan dari pedagang yang mengadakan nasibnya dipasar Ambulu.

Selanjutnya, Sila keempat didalam Pasar Ambulu juga sudah terimplementasikan. Bentuknya pemberian fasilitas dalam bentuk kios yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang itu sendiri. Selain itu, dalam penentuan harga dipasar Ambulu menerapkan sistem tawar menawar antara pedagang dengan pembeli hingga terjadi interaksi antar keduanya, tidak kemudian penjual serta merta memberikan harga tetap kepada pembeli.

Dan yang terakhir adalah sila kelima yang merupakan ujung harapan dari semua Sila. Dan di Pasar Ambulu tingkat kesejahteraan dari para pedagang tidak ada ketimpangan. Tentu ini disebabkan prinsip gotong royong serta tolong menolong yang selalu diterapkan di Pasar Ambulu. Artinya, sila keadilan sosial sudah terimplementasikan di Pasar Ambulu.

Bentuk-Bentuk pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu justru dilakukan oleh para pedagang itu sendiri seperti memperbaiki kios dan usaha melariskan dagangan. Sedangkan Dinas Pasar memiliki peran menertibkan dan mengawasi pasar, agar aktifitas jual beli di pasar ambulu bisa berjalan lancar. Selain itu, Dinas Pasar masih berusaha menyelesaikan sertifikasi lahan. Setelah proses setrifikasi sudah selesai, baru kemudian dinas Pasar mengajukan renovasi bangunan kepada pemerintah daerah.

⁵² Ibid., 84.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Nana. 2015 “*Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1953-1972) Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Sejarah SMA Kelas XII*” Skripsi: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Akbar, Muhammad Ali dan Ghufron, Moh. Idil. 2019. “Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam”, *Jurnal Mashrif al-Syariah*.
- Alnashr, Sofyan. 2015. “Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam.” *Jurnal Islamic Review*.
- Andini, Uly Hikmah dan Soeaidy, Mochamad Saleh dan Hayat, Ainul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Arianty, Nel. 2013. “Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional.” *Jurnal Manajemen & Bisnis*.
- Arodha, Dianidza. 2018. “Ketahanan Ekonomi Masyarakat Enclave dalam Rangkai Sistem Kekerabatan dan Solidaritas Sosial (Studi Kasus di Dusun Curahbleduk, Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi)”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Baswir, Revrison . 2015. “Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme.” *Gema Keadilan*.
- Boediono. 2015. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Creswell, Jhon W. 2015. *Penelitian Kualitatif & desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dumairi dan Nugroho, Tarli. 2014. *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Graha, Andi Nu. 2009. “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi”, *MODERNISASI*.
- Hastangka. 2012. “Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto.” *Jurnal Filsafat*.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional

- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Irwanto, Hartono Tasir. 2016 “*Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi*” Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Jumadin. 2015 “*Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe selatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam*” Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Masruroh, Nikmatul dan Parmono, Agung. 2018. “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowo tengah, Sumber Baru Jember Indonesia.” *Fenomena*.
- _____. 2018. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto dan Boediono. 1981. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.
- Noor, Afif. 2013. “Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern.” *Evonomica*.
- Pramudyo, Anung. 2014. “Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta.” *JBMA*.
- Rahardjo, M. Dawam. 2009. “Menuju Sistem Perekonomian Indonesia.” *LSAF*.
- _____. 2004. “Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Pancasila”, *UNISIA*.
- Risqani, Ita. 2016. “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Pantai Payangan Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Dalam Persepektif Ekonomi Islam*.” Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Ruslina, Elli. 2012. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- _____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukarno. 1964. *Tjamkan Pantja Sila! Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Sutami, Wahyu Dwi. 2012. "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional." *BioKultur*.
- Swasono, Sri-Edi. 2015. *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*. Yogyakarta: Universitas Sriwijaya Press.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Perss.
- Tiningsih, Kiki Aprilia. 2016. "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Sewa Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*." Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Triatmojo, Muhamad Bambang dan Rengga, Aloysius. 2019. "Evaluasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Rejomulyo Di Kota Semarang", *Journal of Public Police an Management Review*.
- Tw, Hg. Suseno. 2003. "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Ukm Dan Entrepreneurship Di Kalangan Pengusaha Kecil" *Jurnal widya manaiemen & akuntansi*.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam.
- Wardana, Faiz Rahman. 2016. "*Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau Dari Perspektif Ekoonomi Islam*." Skripsi: Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Yudistira. 2016. "Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa" *UNNES*.